



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI V DPR RI
DENGAN MENTERI PERHUBUNGAN RI**

- Tahun Sidang : V
Masa Persidangan : 2021-2022
Rapat Ke- :
Jenis Rapat : Raker
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 7 Juni 2022
Waktu : Pukul 10.10 s.d. 14.10 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V)
Gedung Nusantara DPR RI dan Secara Virtual *Zoom Cloud Meeting*
- Ketua Rapat : Lasarus, S.Sos., M.Si. (F-PDIP) – Ketua Komisi V DPR RI
- Acara : 1. Penyampaian Hasil Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI;
2. Pembicaraan Pendahuluan RKA K/L dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2023;
3. Lain-lain.
- Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kabag Komisi V DPR RI
- Hadir : A. Anggota DPR RI:
46 dari 55 orang Anggota dengan rincian:
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)
10 dari 11 orang Anggota
 1. Lasarus, S.Sos., M.Si.
 2. Bob Andika Mamana Sitepu, S.H.
 3. Mochamad Herviano
 4. Hj. Sadarestuwati, S.P., M.MA.
 5. Ir. Sudjadi
 6. Sarce Bandaso Tandiasik, S.H., M.H.
 7. Sri Rahayu
 8. H. Irmadi Lubis
 9. Ir. Effendi Sianipar
 10. Harvey B. Malaihollo
 2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
8 dari 8 orang Anggota
 1. Ir. Ridwan Bae
 2. Drs. Hamka B Kady, M.S.
 3. Cen Sui Lan
 4. DR. H. Ali Mufthi, S.AG., M.Si.
 5. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.

6. Ilham Pangestu
7. Muhammad Fauzi, S.E.
8. Ir. H. Anang Susanto, M.Si.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA
(F-GERINDRA)

5 dari 7 orang Anggota

1. H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si.
2. Sudewo, S.T., M.T.
3. Iis Rosyita Dewi, S.Hum., M.M.
4. Ir. Eddy Santana Putra, M.T.
5. Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M.

4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)

5 dari 6 orang Anggota

1. Roberth Rouw
2. Drs. H. Tamanuri, M.M.
3. H. Syarif Abdullah Alkadrie, S.H., M.H.
4. Sri Wahyuni
5. Drs. Fadholi, M.Ikom.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN
BANGSA (F-PKB)

5 dari 6 orang Anggota

1. H. Ruslan M. Daud
2. H. Dedi Wahidi, S.Pd.
3. Sofyan Ali, S.H.
4. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, M.M.
5. H. Syafiuddin, S.Sos.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

5 dari 5 orang Anggota

1. Dr. H. Irwan S.IP., M.P.
2. Willem Wandik, S.Sos.
3. drh. Jhonni Allen Marbun, M.M.
4. Lasmi Indaryani, S.E.
5. Ir. H. Ishak Mekki, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA (F-PKS)

3 dari 5 orang Anggota

1. Ir. H. Sigit Sosiantomo
2. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A.
3. KH. Toriq Hidayat, Lc.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
(F-PAN)

4 dari 5 orang Anggota

1. H.A. Bakri H.M., S.E.
2. Athari Ghauthi Ardi
3. Hj. Hanna Gayatri, S.H.
4. H. Boyman Harun, S.H.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN (F-PPP)

1 dari 2 orang Anggota

1. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S.

B. UNDANGAN:

1. Menteri Perhubungan RI (Dr. (HC). Ir. Budi Karya Sumadi)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT / F – PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si):

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati.

Kita mulai rapat kita pada pagi siang hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang, dan
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat, Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI,
Tang terhormat, Menteri Perhubungan beserta seluruh jajarannya,
Hadirin yang berbahagia.

Mengawali rapat kita pada hari ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada siang hari ini untuk menghadiri Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan sesuai dengan undangan yang sudah kita sampaikan, dengan agenda pembicaraan yang sudah kita sampaikan kepada seluruh Anggota dan mitra kerja Kementerian Perhubungan. Rapat ini dihadiri baik secara fisik maupun secara virtual.

Sebelum lebih lanjut, saya sampaikan pengantar rapat pada hari ini, ada informasi ada Anggota baru ya, di Komisi V, ya, yang pertama dari Fraksi Golkar Saudara Ir. Anang Susanto, M.Si. nomor Anggota 288, daerah pemilihan Jawa Barat II dan Saudara mah, Muhammad Fauzi, S.E. nomor Anggota 344 daerah pemilihan Sulawesi Selatan III, Sulawesi Selatan III yang masuk ke Komisi V menggantikan Saudara Bambang Hermanto, S.E. yang pindah ke Komisi VII, serta penambahan Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan, Saudara Harvey B Malaihollo. Kalau Malaihollo ini pasti semua sudah kenal lah ya, artis tahun 80-an ya, nomor Anggota 264 daerah pemilihan Papua Barat, beliau menggantikan almarhum Jimmy Demianus Ijje.

Menurut laporan dari Sekretariat, daftar hadir Komisi V pada Rapat Kerja hari ini dengan Menteri Perhubungan 39 orang, fisik 19 dan virtual 20 orang dari 8 unsur Fraksi yang berbeda.

Oleh karena itu, sebagaimana diatur di dalam Pasal 281 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat ini sudah memenuhi kuorum, oleh karenanya izinkan saya membuka Rapat Kerja pada hari ini dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1), Rapat Kerja ini saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.10 WIB)

Terima kasih saya sampaikan penghargaan kepada Saudara Menteri Perhubungan beserta seluruh jajarannya, yang telah menghadiri undangan rapat kami pada siang hari ini.

Sebagaimana undangan yang telah disampaikan, Rapat Kerja pada hari ini diagendakan acara membahas pembicaraan pendahuluan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah dalam RAPBN Tahun Anggaran 2023, dan lain-lain, serta penyampaian hasil kunjungan kerja Komisi V DPR RI yang dilaksanakan pada masa persidangan pertama sampai keempat tahun sidang 2021/2022 baik kunjungan kerja spesifik maupun kunjungan kerja masa reses komisi.

**Saudara Menteri,
Pimpinan dan Anggota Komisi V,
Hadirin yang berbahagia.**

Sesuai dengan jadwal yang sudah disusun oleh Badan Anggaran DPR RI, setiap komisi dialokasikan waktu untuk membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun 2023 dan RKP Tahun Anggaran 2023 bersama dengan Kementerian/Lembaga mitra kerja yang hasil pembahasannya akan disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran DPR RI untuk disinkronisasi paling lambat tanggal 10 Juni yang akan datang.

Terkait dengan RKP dan pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2023, Pemerintah telah menyampaikan dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal Tahun 2023. Tema rencana kerja Pemerintah Tahun 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, di mana peningkatan produktivitas merupakan kunci sebagai upaya Pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pasca krisis pandemi Covid-19.

Selanjutnya, Pagu Indikatif Kementerian Perhubungan Tahun 2023 yang sampai kepada kami adalah sebesar 33,021 Triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional di bidang perhubungan melalui pelaksanaan program antara lain:

1. Program infrastruktur konektivitas;
2. Program pendidikan dan pelatihan vokasi; serta
3. Program dukungan manajemen.

Pada kesempatan ini pula kami ingin menyampaikan beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian dari Kementerian Perhubungan antara lain sebagai berikut:

Yang pertama, dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai tema RKP Tahun 2023, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan agar belanja Kementerian Tahun 2023 diarahkan untuk pemerataan layanan dan kesejahteraan masyarakat, mendukung percepatan infrastruktur konektivitas dan infrastruktur padat karya;

Yang kedua, perlunya mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perhubungan, memperkuat sinergi antara pusat dan daerah, serta mendorong *stakeholder* untuk berpihak pada pengembangan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur konektivitas di daerah tertinggal untuk mengurangi keterisolasian;

Yang ketiga, perlu dilakukan evaluasi penyelenggaraan tol laut guna mengoptimalkan konektivitas logistik sampai ke daerah-daerah pedalaman, terpencil dan pulau terluar dalam rangka pemerataan dan kesenjangan ekonomi dalam pembangunan ekonomi antar wilayah;

Empat, perlunya mendorong partisipasi swasta dalam merancang percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas, mengingat kebutuhan yang besar, sementara ruang kapasitas fiskal sangat terbatas.

Sejalan dengan itu, dalam kesempatan ini kami sampaikan kepada Menteri Perhubungan beserta jajarannya, agar dalam proses penyusunan Pagu Anggaran Tahun 2023 dapat memperhatikan pula saran, masukan dari Komisi V DPR RI, baik yang disampaikan dalam rapat-rapat kerja, rapat dengar pendapat, maupun yang disampaikan secara tertulis kepada Kementerian Perhubungan baik melalui forum rapat ini maupun disampaikan di saat-saat kunjungan kerja.

Terkait dengan hal ini Pak Menteri, Pimpinan tadi sudah melakukan pertemuan singkat sebelum ke ruangan rapat kali ini.

Teman-teman, Anggota sekalian yang saya hormati,

Kita sepakat supaya nanti pembahasan, waktu ini kan sangat terbatas ya, kita selalu dibatasi oleh waktu ketika kita membahas anggaran. Jadwal dari Banggar itu biasanya Pak Hamka, ya, ada Pak Syarief juga di sini Wakil Pimpinan Banggar, ini kan waktunya singkat betul, kalau kita mau gali secara mendalam pasti waktunya tidak cukup.

Oleh karenanya supaya efektif, tadi Pimpinan bersepakat nanti masing-masing Anggota konkrit saja, kita sampaikan usulan, ya, dari masing-masing Anggota baik dari Dapilnya mungkin juga dari Fraksinya kepada mitra kerja kita termasuk lah Kementerian Perhubungan.

Kemudian di rapat berikutnya kita tinggal sinkronisasi apakah usulan yang disampaikan oleh kita tersebut, sejauh mana bisa diakomodir oleh Pemerintah gituloh. Tentu tidak semua usulan kita yang kita usulkan mampu diimplementasikan oleh Pemerintah, karena ini sangat terkait dengan pagu anggaran yang ada di Kementerian.

Namun demikian ya, manakala itu sejalan dengan program Pemerintah yang ada di daerah masing-masing adalah merupakan kewajiban juga untuk kita semua, Pimpinan dan Anggota Komisi V menjalankan sumpah kita sebagaimana ketika kita diambil sumpah jabatan waktu dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, salah satunya memperjuangkan aspirasi daerah pemilihannya.

Lebih singkat, saya sampaikan nanti baik Pimpinan maupun seluruh Anggota, ya, kita sampaikan secara konkrit, nanti bertahap dengan rapat-rapat kerja kita selanjutnya, rapat dengar pendapat kita selanjutnya dengan Eselon I, kita konkritkan usulan-usulan yang kita sampaikan, maka dengan demikian seharusnya kalau menurut saya rapat tidak perlulah berlarut-larut.

Kemudian hari ini, Pak Menteri tadi sudah menyampaikan kepada kami Pimpinan ya, beliau akan mendampingi Presiden kunjungan ke Dapilnya Pak Ridwan, ke Wakatobi dan nanti jam 3 sore beliau harus sudah terbang, berarti kemungkinan kita mudah-mudahan Pak Menteri jam 2 kita sudah bisa selesai rapat kita pada hari ini, sehingga Bapak bisa melaksanakan itu dalam rangka mendorong kemajuan infrastruktur di Wakatobi, Dapilnya Pak Ridwan Bae.

Untuk mempersingkat waktu, barangkali itu sebagai pengantar dari saya, saya persilakan Pak Menteri untuk menyampaikan kerangka pokok-pokok pikiran RKA K/L dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, saya persilakan.

MENTERI PERHUBUNGAN RI (Dr.(HC). Ir. BUDI KARYA SUMADI):

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya mesti lapor kepala suku dulu Pak Hamka dan Pak Ridwan Bae. Semula saya mau seragam Pak, pakai topi-topi, tapi topi saya diakusisi sama Pak Ketua, Pak.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Nanti saya ganti besok, Pak Menteri.

MENTERI PERHUBUNGAN RI (Dr.(HC). Ir. BUDI KARYA SUMADI):

Tadi saya bilang diakusisi yaudah saya sekarang gak pakai topi jadinya.

F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Pimpinan, oh ini pengakuan dari Menteri ketahuan sekali ini Ketua Komisi langsung berpihak itu dari awal karena topinya itukan, membatasi rapat kalo bisa setengah jam aja selesai *assalamualaikum*, tutup *wassalamualaikum*.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Paling lama jam 12.

KETUA RAPAT:

Lanjut, Pak Menteri.

MENTERI PERHUBUNGAN RI (Dr.(HC). Ir. BUDI KARYA SUMADI):

**Bapak-Ibu sekalian,
Yang saya hormati Pak Ketua,
Bapak-Bapak Wakil Ketua,
Para Anggota Komisi V yang saya hormati.**

Puji syukur kita bisa bertemu dalam keadaan sehat dan bisa membahas RKA. Pertama kali saya tentu akan berkenalan dengan Pak Anang Susanto. Saya belum pernah ketemu ya tentunya saling berkenalan nanti *welcome* kita untuk diskusi untuk hal-hal yang penting bagi, terutama Dapil-Dapil Bapak.

Yang kedua juga kepada Pak Fauzi, Sulsel tambah kuat nih, kesebelasannya tambah banyak nih. Salam kenal, Pak. Kalau Pak Harvey saya kenal, tapi Pak Harvey nggak kenal sama saya kali ya, salam kenal Pak. Jadi salah satu favorit sejak masa muda ya Pak Harvey, Pak. Terima kasih Pak bisa berkenalan nanti kita bisa *jam session*, Pak.

Bapak-Ibu sekalian,

Saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi sangat komprehensif ya dan menyasar pada hal-hal yang mendasar berkaitan dengan pemerataan ekonomi, pemercepatan dari padat karya, peningkatan SDM, mengeratkan pusat dan daerah, evaluasi tol laut, dan juga partisipasi swasta dan mengingatkan bahwa masukan dari, dan saran dari para Anggota kiranya menjadi catatan.

Nah, oleh karenanya kepada rekan-rekan semua, Pak Sekjen, para Dirjen dan para Kepala Badan dan teman-teman yang hadir di sini agar ini menjadi catatan utama dan nanti kita diskusikan dalam yang detail.

**Bapak-Ibu sekalian,
Pak Ketua,
Bapak-Bapak Wakil Ketua, dan
Bapak-Ibu Anggota.**

Kita bersyukur bahwa, selama masa ini Covid relatif mereda ditandai dengan melandainya walaupun kita setelah mengadakan kegiatan-kegiatan di

lebaran tapi relatif ini melandai dan terkendali, sehingga kita harapkan kita akan tumbuh lebih bagus.

Secara kuantitatif tampak bahwa triwulan pertama ini ada satu *reborn*. Ya jadi dari catatan dari BPS ada kita mampu tumbuh 5% *year on year* dan ini lebih tinggi dari beberapa negara maju di dunia ya. Menurut catatan yang ada Tiongkok itu 4,8, Singapura itu 3,4, Amerika Serikat 4,2 dan Jerman 4,0. Jadi kita relatif tinggi dan ini satu keberhasilan dari Pemerintah dan masyarakat, tentu di bawah pengawasan dari DPR.

Tetapi kita juga harus ngerti bahwa, ada potensi yang ketidakpastian itu tetap ada tentang Covid maupun gejala geopolitik dunia yang tentunya Kementerian Keuangan sudah melakukan suatu antisipasi dengan biaya energi yang tinggi dan sebagainya. Tentu anggaran ini direfleksikan dalam bentuk bagaimana anggaran itu lebih di *squeeze* ya, dilakukan suatu efisiensi, tetapi kita harus lakukan dengan baik.

**Pak Ketua,
Bapak-Bapak Wakil Ketua,
Bapak-Ibu Anggota.**

Kita tema dari RKP ini adalah peningkatan produktivitas untuk transportasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutannya. Jadi inklusif ini punya arti yang dalam, kita tidak boleh eksklusif pada fungsi-fungsi kita saja, tetapi walaupun kita membuat katakanlah Makassar – Parepare, kami kemarin Pak Hamka diskusi dengan Pemda untuk mengembangkan wisata-wisata di antaranya *rammang-rammang*, itu indah sekali. Jadi kami tidak tusunya pada transportasi saja, tapi bagaimana kereta api itu bisa berfungsi ganda, bahkan *multi effect* gitu.

Nah, oleh karenanya, kita juga ingin beberapa catatan-catatan secara nasional katakanlah tumbuh 5,3 sampai 6, indeks pembangunan itu 7 koma, 73%, juga tingkat kemiskinan yang menurun dan kita juga fokus pada kegiatan-kegiatan ini kita lakukan berkaitan dengan upaya persiapan di IKN.

Hal ini perlu kita lihat bahwa, identifikasi kegiatan ini terutama mendukung rencana jangka menengah, jangka panjang – menengah ya, *major project* yang menjadi andalan konektivitas dan direktif dari Pemerintah atau kita bersama PSN, Perpres, dan kegiatan prioritas, lalu mengakomodasi, mempertimbangkan usulan dari Musrembangnas maupun Musrembang yang ada di provinsi-provinsi. Pengalokasian proyek ini dapat tuntas, diharapkan 2024.

Tadi saya juga lapor kepada Bapak Pimpinan bahwa, kita memang seyogyanya konsentrasi daripada menyelesaikan proyek-proyek yang sudah ada, bahwa kita ada inisiatif untuk ada proyek baru maka ini kita batasi pada *project-project* untuk membuat katakan perencanaan dan *pen lock* ya.

Bahkan kami sudah mulai menginisiasi di beberapa tempat, khususnya di Palembang, kita berikan kesempatan BUMD dan swasta untuk

mengembangkan pelabuhan tanpa APBN dan tanpa BUMN. Nah, ini bisa menjadi satu format yang baru, yang bisa ditempatkan di daerah-daerah yang lain.

Benar bahwa aspek pendanaan menjadi suatu yang sulit, maka apa yang saya sampaikan tadi menjadi satu inisiatif yang harus terjadi. Dari 5 tahun terakhir ini kita *gap* dana yang kita butuhkan dengan dana yang tersedia itu relatif menjauh ya. Jadi, sebenarnya peran-peran daripada swasta semakin baik, bahkan dalam dua hari ini saya intensif bicara dengan World Bank dan juga bicara dengan Jepang dan Korea untuk pendanaan proyek-proyek strategis, sehingga proyek strategis itu tidak mengambil dari alokasi APBN setiap tahun, tapi bisa dengan *loan* jangka panjang ataupun paling tidak *evaluate payment* yang *term* nya itu sampai 30 tahun.

Bapak-Ibu sekalian,

Kita juga melihat bahwa pagu kebutuhan adalah 73 dan kita dapat 33. Jadi *gap* daripada 73 ke 33 itu harus kita kreasi dari *creative financing*, baik itu kita lakukan dengan swasta dan kita sudah lakukan beberapa pendekatan dengan swasta untuk mengembangkan pelabuhan, bandara, dan macam-macam, tetapi *loan* atau kerja sama internasional juga kita rintis untuk beberapa, terutama dengan Korea dan Jepang dan beberapa negara Eropa.

Bapak-Ibu sekalian,

Kita memang dapat tugas untuk menyelesaikan target PSN ya, proyek nasional, proyek pro rakyat dan juga melakukan pembayaran atas tunggakan dan dukungan terhadap IKN menjadi satu bagian di mana untuk IKN kita lebih banyak nanti di sektor darat dan sektor laut yang akan kita *support*, karena bandarannya mungkin akan dikembangkan oleh Kemhan dan kereta api mungkin butuh waktu untuk mempersiapkannya.

Bapak-Ibu sekalian,

Dari surat Menteri Keuangan yang mungkin perlu kami laporkan adalah sumber pendanaan. Jadi rupiah murni itu paling banyak 18 Triliun, PNBPN itu 3,5 Triliun. Nah, PNBPN ini perlu kami laporkan bahwa ini kalau 3,5 Triliun itu hanya tidak sampai 50% dari PNBPN yang kami peroleh. Nah, kami nanti dibantu Bapak-Bapak yang di Banggar untuk menaikkan persentase PNBPN yang mungkin kita lakukan. Jadi, kalau 8 Triliun kalau bisa 75% berarti kita ada *upside* kurang lebih 2 Triliun selain PNBPN sendiri kita lakukan intensifikasi. Banyak sekali peluang-peluang PNBPN seperti yang Bapak-Bapak sampaikan yang akan kita intensifkan sehingga itu bisa dilakukan.

BLU ini juga sudah merupakan hal yang baik Pak, selagi contohnya kemarin Makassar, Pak Iwan. Jadi kita ada BLU rumah sakit di sekolah di Makassar, walaupun ini belum terlalu besar tapi langkah maju untuk membuat BLU ini menjadi perhatian bagi kita. Pinjaman luar negeri 900 Miliar dan SBSN 8,7 Triliun, ini memang menjadi satu *anchor* daripada program kita dan ini kita harapkan bisa berjalan dengan baik.

**Bapak-Bapak Ketua, dan
Wakil Ketua, dan
Para Anggota Komisi V yang saya hormati.**

Dari pagu indikatif ini kita melakukan *exercise* bahwa, terdapat *gap* dana rupiah murni sebanyak 1,3 Triliun, belanja pegawai juga terjadi satu penurunan, belanja non-operasional juga ada penurunan, SBSN ada peningkatan dan anggaran vokasi juga menggembirakan memberikan suatu kenaikan yang berarti, sehingga program untuk peningkatan SDM itu lebih baik.

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Kita juga melihat bahwa komposisi yang ada di masing-masing Eselon I ada suatu penyesuaian di kereta api sebanyak 849 Miliar, sehingga hasil akhir daripada rekomposisi itu Sekjen sebanyak 580 Miliar, Irjen 96 Miliar, darat itu 5,1 Triliun, laut 8,8 Triliun, udara sebanyak 7 Triliun, perkeretaapian 7,2 Triliun, BKT itu 180 Miliar, BPSDM 3,6 Miliar dan 3,6 Triliun, BPTJ sebanyak 250 Miliar.

Lalu apa yang akan kita utamakan dalam peningkatan produktivitas untuk transportasi ekonomi yang inklusif yang berkelanjutan.

1. Melakukan, melanjutkan pengembangan infrastruktur konektivitas produktif dan mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah;
2. Meningkatkan keselamatan keamanan sektor transportasi;
3. Mendukung program SDM dan vokasi;
4. Mendukung pemerataan pembangunan nasional; lalu
5. Melaksanakan program pro kerakyatan dengan program PEN; lalu
6. Memastikan keberlanjutan *multiyears contract* dan juga proyek nasional dan PSM; lalu
7. Pemenuhan kebutuhan pokok, penyelesaian KDP tunggakan, serta keperluan pendampingan.

Lalu kita melakukan perencanaan yang lebih intens dan perkembangan IKN untuk men-*support* angkutan massal yang ada di IKN. Mendukung dan inovasi di antaranya berkaitan dengan *creative financing* dan kita juga harus *concern* tentang energi baru dan terbarukan dan percepatan pemanfaatan mobil listrik.

Bapak-Ibu sekalian,

Kita juga berkomitmen bahwa untuk penyediaan dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi, peningkatan keselamatan menjadi satu *concern* dan tentu dengan ruang fiskal yang terbatas maka ada satu keharusan kita untuk lebih kreatif untuk melakukan apakah meningkatkan PNBPN, melakukan BLU, kolaborasi dengan BUMN, Pemda, swasta dan masyarakat, ini menjadi penting dan menjadi suatu hal yang sebelumnya kurang dipikirkan tapi kita akan intensifkan.

Beberapa *highlight* dari kegiatan 2023, satu adalah pengembangan infrastruktur konektivitas yang produktif, kita akan menyelesaikan Makassar –

Parepare, *Insha* Allah bulan Oktober mulai beroperasi, pembangunan Tanjung Carat, nah ini saat ini pelabuhan yang kita kerjasama dengan BUMD dan swasta. Kalau, karena kita tidak ada alokasi APBN di sana.

Kita menyelesaikan Patimban pada tahap 2, di mana ada satu pekerjaan *loan* dari Jepang yang bisa menyelesaikan Patimban, membangun beberapa bandara seperti Sibisa, Nabire baru, ada Fakfak, Mentawai, ya ada beberapa bandara-bandara di Sulawesi dan Kalimantan menjadi *concern*.

Lalu, mendukung dan meningkatkan keselamatan. Jadi keselamatan ini merupakan Tusi dari Kementerian Perhubungan, sehingga kita harus dukung kegiatan ini.

Lalu, kita berusaha untuk melakukan layanan transportasi publik dengan melakukan BTS. BTS sendiri sudah ada di beberapa kota dan kita akan tingkatkan di banyak kota. Memang Palembang kita *exercise* untuk dimaksimalkan mengingat ada satu fasilitas LRT yang mampu berkolaborasi dengan BTS, sehingga angkutan massal menjadi baik.

Upaya untuk meningkatkan tol laut dengan merehabilitasi Pelabuhan, dermaga dan juga kapal-kapal menjadi satu *concern* dan kita juga di beberapa stasiun kereta api kita akan melakukan perbaikan.

SDM sendiri menjadi satu tekanan karena BPSDM ini menjadi satu hal yang penting bagi kita, satu sisi mempersiapkan tenaga-tenaga terdidik untuk di level nasional, kita tambahkan program *degree* pasca sarjana baik vokasi maupun umum, kita bekerjasama dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi nasional yang kuat dan *double degree* dengan beberapa *international university* dan BPSDM juga kita harapkan pertukaran dari mereka yang sudah *berkerja* atau mengabdikan kepada negara nanti juga bisa menjadi dosen dan kita upayakan bahwa, karir sebagai dosen ini dapat mereka teruskan sampai mendapatkan gelar S3, maupun juga mendapat gelar Profesor, karena Guru Besar itu akan memberikan nilai yang lain terhadap institusi pendidikan.

**Bapak-Ibu Ketua,
Wakil Ketua, dan
Anggota Komisi V yang saya hormati.**

Demikianlah, saya sampaikan, beberapa hal dan kiranya kami mohon dukungan dan masukan-masukan agar RKA ini bisa berjalan dengan baik, tentu di hari-hari ke depan ada beberapa rapat-rapat dengan Eselon I silakan diskusikan agar apa yang kita laksanakan bisa memberikan suatu kebahagiaan bagi bangsa.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Shanti shanti om,
Namo budhhaya, dan

Salam kebajikan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Menteri Perhubungan.

Demikian, Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V DPR RI paparan yang sudah disampaikan oleh Kementerian Perhubungan.

Untuk mempersingkat waktu saya tidak perlu mengulas lagi termasuk kopiah yang saya pakai, kita langsung saja ke pendalaman. Sebenarnya saya mau menanggapi punya Mas Dewo tadi, tapi nanti jadi panjang biar jadi pendek saya *ndak* tanggapi juga ya.

Saya langsung saja pertama Pak Irwan, silakan. Untuk masuk ke pendalaman, bersiap-siap Pak Bob Andika.

Silakan.

F – P. DEMORKAT (Dr. H. IRWAN, S.IP., M.P.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Yang saya hormati Ketua Komisi V,
Pimpinan Komisi V, beserta
Seluruh rekan-rekan Anggota Komisi V yang saya banggakan,
Yang saya hormati Bapak Menteri Perhubungan Republik Indonesia,
Bapak Sekjen, Bapak Dirjen, beserta Bapak Irjen dan Kepala Badan,
Pak Direktur serta seluruh keluarga besar Kementerian Perhubungan
yang hadir pada rapat hari ini,**

Ada beberapa catatan saya untuk Kementerian Perhubungan terutama terkait harga tiket, Pak Menteri. Ini beberapa pesan ya dari masyarakat agar betul-betul di, ada kemudian langkah konkrit Kementerian untuk kemudian mengevaluasi terkait harga tiket saat ini yang memang merata, itu. Kalau kemarin sebelum mudik itu saya sampaikan ada di beberapa provinsi, ini hampir merata sampai ke bandara-bandara perintis pun naik.

Tentu sangat bijaksana kalau kemudian ada evaluasi ya terutama terkait kebijakan tushlah yang sebenarnya sudah diambil oleh Kementerian Perhubungan sebelumnya, tetapi secara dampak dari kebijakan ini juga tentu sangat bijaksana kalau dievaluasi, termasuk juga tarif batas atasnya banyak yang di, apanya dilanggar oleh maskapai.

Dengan situasi seperti ini, ini tentu menjadi beban ya bagi masyarakat di pasca pandemi ini beberapa peningkatan apa namanya harga-harga bahan pokok dan lain-lainnya. Ilustrasi, ilustrasinya saja misalnya kalau dari Kaltim ke Jogja itu 2,5 Juta tiket itu, kemudian masuk Borobudur 750 Ribu ini tambah berat gitu masyarakat, sehingga menurut saya sih apa namanya harga tiket ini harus kemudian menjadi perhatian serius Kementerian Perhubungan untuk

melakukan pengawasan dan juga mengambil kebijakan untuk mengendalikan harga tiket yang memang cukup mahal ini.

Kemudian terkait di bandara ataupun terkait maskapai penerbangan ini. Tentu kami apresiasi terus peningkatannya tetapi menurut saya sih pasca pandemi normal ini ada harus kemudian ada penambahan armada dan juga kami temui di bandara itu ada kekurangan karyawan, mungkin pada saat pandemi dulu ada pengurangan ya dari, kemudian sekarang mereka belum siap untuk menambah karyawan dan itu sangat berpengaruh baik terhadap antrian, kemudian pelayanan di bandara. Mudah-mudahan ini bisa dituntaskan oleh Kementerian Perhubungan.

Kemudian, Pimpinan, terkait daerah pemilihan untuk Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Di Balikpapan itu ada muara manggar yang mana menjadi pusat perikanan terbesar di Kaltim, yang mana untuk men-*support* Kaltim juga tentu nanti dalam kaitan IKN dan yang lainnya.

Namun dalam beberapa belasan tahun ke sini kemudian ada pendangkalan yang cukup membuat para nelayan ini kemudian sangat-sangat menderita, bahkan ada korban meninggal dunia dan lainnya. Sebelum lebaran kemarin saya sudah meninjau dengan KSOP Balikpapan dan juga Kepala distrik navigasi Samarinda dan kita sepakat bahwa memang harus dilakukan pembangunan rambu suar, karena beberapa kali masalah apa namanya kapal nelayan itu karam, kemudian ada yang meninggal jiwa, berita acaranya sudah ada di kantor distrik navigasi.

Saya harap tahun depan, kita paham tahun ini tidak ada anggaran tetapi tahun depan agar bisa dianggarkan terkait pembangunan rambu ruas, eh rambu suar di muara manggar ini.

Kemudian, terkait yang disampaikan Pak Menteri tadi mengenai prioritas *existing*. Di sana ada pengembangan fasilitas pelabuhan di Sangkulirang di ini kampung kelahiran saya dan sangat-sangat produktif ya untuk PNBP nya pelabuhan ini dan akan terus meningkat tiap tahunnya, agar pengembangan fasilitas pelabuhan ini terus bisa ditingkatkan jangan apa namanya jangan dilanjutkan jangan berhenti karena sudah dianggarkan dua tahunan ini, saya pikir harus dituntaskan sampai dengan 2024 nanti, termasuk juga di pengembangan fasilitas pelabuhan di *existing* di Tanjung Redep di Kabupaten Berau.

Kemudian, untuk Direktorat Jenderal Perhubungan Darat agar tahun depan dibangun ya dermaga sungai di Samarinda. Samarinda ini adalah kota, Ibukota Kaltim yang dilalui Sungai Mahakam, Sungai Mahakam cukup-cukup menjadi apa namanya transportasi yang sangat vital di Kaltim, karena memang sungai ini menghubungkan beberapa Kabupaten di hulu ya di hulu Mahakam yang kemudian menuju Ibukota Samarinda, sehingga terus dilanjutkan terkait juga program pembangunan halte sungai.

Sedangkan halte sungai tahun ini kami harap segera dituntaskan untuk DED-nya, Pak Menteri. Karena ini udah bulan Juni, kalau lambat disahkan ini

DED-nya yang halte sungai yang tahun ini ada tiga lokasi itu kami yakin itu akan memperlambat penyerapan maupun pelaksanaan halte sungai ini.

Kemudian untuk Direktorat Jenderal Pehubungan Udara. Kami ingin mengingatkan bahwa, di Kutai Timur itu ada bandara perintis yang sudah dihibahkan oleh masyarakat ke Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, agar ada peningkatan pengembangan bandaranya. Ini bukan bikin bandara baru, hanya *runway*nya itu masih tanah sehingga beberapa kali mau *landing* itu balik lagi karena kondisi *runway* yang tidak layak agar bisa ditingkatkan apa namanya *runway*-nya ini.

Kemudian untuk tahun ini karena tidak jadi perpanjangan *runway* di bandara Apt Pranoto, padahal ini masuk dalam perencanaan bandara yang prioritas untuk IKN agar bisa kemudian tahun ini dilaksanakan untuk pembangunan *landscape* halaman depan bandara Apt Pranoto di Samarinda ini, agar bandara kita ini makin apa namanya makin cantik dan siap, apalagi sekarang sudah sangat ramai ya pasca kemudian pandemi Covid sudah normal.

Pak Menteri, ini apa yang sampaikan tidak ada yang *multiyears*, tidak ada yang membutuhkan biaya yang sampai ratusan miliar, ini memang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat Kaltim, jangan sampai persepsi Kementerian Perhubungan, persepsi kawan-kawan di sini ada IKN itu kemudian 10 Kabupaten ini terlupakan.

Saya pikir Kementerian, semua Kementerian akan ada fokus program di IKN, tetapi bagi kami IKN ini adalah tentu sebuah tujuan visi yang ingin dicapai Pak Presiden, tetapi di depan mata kami masih ada kesenjangan, ketidakadilan di 10 Kabupaten ini dengan kontribusi Kaltim yang 700-an Triliun tiap tahun saya pikir apa yang kami sampaikan ini kemudian harus menjadi perhatian Kementerian Perhubungan dan pada kesempatan rapat ini saya mohon dukungan Pimpinan Komisi V dan juga rekan-rekan Anggota Komisi V.

Itu saja, Pimpinan yang ingin saya sampaikan sebagai penghargaan dan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Perhubungan selama ini. Saya ingin kasih satu pantun.

*Goreng Ikan gembung dan ikan sepat,
Dimakan dengan urap saat istirahat,
Kinerja Kementerian Perhubungan makin hebat,
Kami harap Kaltim juga selalu diingat.*

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Silakan, silakan. Ini menang banyak, oleh **Pak Irwan**. Aspirasi sudah disampaikan masih kurang kuat, hantam pakai pantun masih kurang kuat, kasih

lagi catatan. Nah, jadi sudah sampai segitunya Pak Menteri sedih juga saya lihatnya.

Baik, selanjutnya Pak Bob, ya. Saya minta kita persingkat yang penting yang terakhir tadi Pak Irwan, serahkan catatannya karena kita sudah garis bawahi tadi, itu untuk di atensi secara serius oleh Kementerian.

Silakan, Pak Bob.

F – PDIP (BOB ANDIKA MAMANA SITEPU, S.H.):

Terima kasih, Ketua.

KETUA RAPAT:

Bersiap-siap Pak Syarief.

F – PDIP (BOB ANDIKA MAMANA SITEPU, S.H.):

**Yang saya hormati Pak Ketua, beserta
Pimpinan beserta seluruh teman-teman Anggota Komisi V,
Yang saya hormati, Menteri Perhubungan, Pak Dirjen, Pak Sekjen beserta
seluruh jajarannya.**

Saya langsung saja, Pak, supaya menyingkat waktu kata Pak Ketua.

Saya lihat di sini Pak, SBSN 2023 ini mengalami peningkatan Pak, tapi yang berdampak penuh ini yang mendapat pemotongan ini Pak, saya lihat di Dirjen Perkeretaapian.

Saya melihat ini Pak, banyak dilakukan pemotongan sampai 849 Miliar, Pak. Saya membayangkan ini Pak, di daerah Sumut ini Pak, semua kegiatan perkeretaapian ini menggunakan SBSN. Apakah ini nanti pada Tahun 2024 ini akan tuntas pembayaran menggunakan dana SBSN ini, Pak. Karena saya lihat semua proyek-proyek perkeretaapian di Sumut menggunakan SBSN walaupun ini bukan Dapil saya, Pak. Saya lihat jalan raya Medan dan Binjai pun SBSN, namanya aja Binjai Pak, tapi itu bukan masuk Dapil saya, cuma sampai di Medan.

Langsung Pak ini saya ke Dapil Pak, supaya menyingkat waktu. Saya tidak banyak permintaan, Pak. Untuk Dapil saya Pak ini langsung mohon diperhatikan dan dicatat oleh Pak Dirjen Perkeretaapian, semua peningkatan jalur kereta api Pak itu rata-rata itu Dapil saya tidak ada pernah kena, Pak. Saya mohon untuk ke depan tolong diperhatikan ini Pak, peningkatan jalur Planakan menuju Kisaran. Karena ini salah satu jalur yang banyak digunakan oleh CPO, Pak.

Ini dampaknya luar biasa, Pak. Yang selama ini yang dibangun ini lebih banyakan untuk kepentingan orang banyak itu daerah Rantau Prapat, saya rasa untuk tahun ini selesai lah, Pak, utamakan dulu ke planakan Kisaran ini.

Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, saya gak perlu banyak-banyak mengusulkan aspirasi di Dapil, Pak Ketua. Karena satu pun nanti belum tentu juga nanti diperhatikan. Mungkin saya ini satu dulu saya sampaikan kepada Kementerian.

Mungkin ini sedikit Pak Ketua saya ucapkan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ada pantun? Catatan?

F – PDIP (BOB ANDIKA MAMANA SITEPU, S.H.):

Ga usah Pak Ketua pantunya habis, satu kan catatan Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Cuma satu gak perlu dicatat ya. Baik.

Karena kita nggak bisa ngerem ini. Pak Menteri kalau sudah melayani Presiden ya jam 2 nanti kita selesaikan kalau gak nanti sisanya kita lanjutkan di Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon I.

Nanti kita dengan Eselon I Pak, ini kan sebetulnya hari ini agendanya hanya penyampaian sesuai irama kita di DPR, penyampaian pagu indikatif kan gitu ya Pak Syarif ya. Dari Kementerian menyampaikan pagu indikatifnya sekian itu nanti baru kita bicarakan, sudah disampaikan ke komisi kita surati Badan Anggaran, kurang lebih alurnya begitu ya.

Nanti soal program ini kita dengan Eselon I. Saya berharap juga temen-temen berikutnya Ketua tidak perlu mengingatkanlah berapa lama harus bicara, saya tau.

Silakan Pak Syarif, bersiap-siap Pak, eh Ibu Sadarestuwati.

F – P. NASDEM (H. SYARIEF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH):

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullah Wabarakatuh,

**Ketua Komisi serta Pimpinan Komisi yang saya hormati,
Teman-teman Anggota Komisi V,
Bapak Menteri beserta seluruh jajaran Eselon I yang saya hormati,**

Pertama-tama syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. pada hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan rapat pada hari ini.

Berkaitan dengan yang akan saya sampaikan yang pertama berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bob Andika tadi, karena memang ada tiga yang menjadi prioritas dalam pengakomodiran program. Walaupun kami maklumi kemarin kita sudah rapat untuk asumsi awal, memang belanja untuk Kementerian dan kelembagaan agak sedikit menurun, namun dengan demikian tentu tidak menjadi apa menjadi pesimis dalam kita untuk memprioritaskan program-program yang sangat strategis.

Nah, berkaitan dengan itu saya kira memang perlu ada ketegasan berkaitan dengan, karena salah satu yang menjadi prioritas itu adalah selain dari Presiden, kemudian juga berkaitan dengan kunjungan Dewan apakah reses maupun perorangan berkaitan dengan aspirasi Dapil.

Saya kira ini perlu tadi apa yang disampaikan Kementerian Perhubungan transparan, anggaran yang inklusif saya kira ini perlu juga transparan sehingga secara moral berkaitan dengan apa yang telah kita usulkan untuk kita sampaikan kepada daerah pemilihan. Ini mungkin saya kira perlu penegasan untuk itu kaitan. Umpamanya ini dari Dapil ini, ini yang bisa diakomodir dilaporkan. Ini tentu kita harapkan berkeadilan di dalam mengakomodir itu.

Yang kedua, saya mengingatkan kembali, ini walaupun bukan di ranahnya Kemenhub tetapi regulasinya di Kemenhub, apalagi dengan sudah masuknya ke APBN berkaitan dengan kereta cepat Bandung, Jakarta – Bandung Pak, karena ini sudah hampir Tahun 2024, tapi saya lihat melihatnya ya sampai kapan ini penyelesaiannya.

Pak Menteri, berkaitan dengan itu kaitkan dengan proyek-proyek yang *multiyears*, mungkin di daerah kami juga banyak ada beberapa. Saya kira perlu menjadi prioritas lah untuk penyelesaian terhadap hal-hal itu, karena kita sudah 2022 sebentar lagi 2023, sesuai dengan kebijakan di 2024 sudah selesai supaya tidak menjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari.

Kemudian kembali lagi berkaitan dengan masalah di Dapil. Saya cuma akan menegaskan kembali berkaitan dengan Surat Keputusan Kementerian, berkaitan dengan pelabuhan Bandara Kayong itu, Pak. Sampai saat ini RPP berkaitan dengan sisi udaranya yang merupakan *domain* dari Kementerian Perhubungan itu sampai saat ini juga kemaren Bupatinya mempertanyakan kembali belum juga diturunkan karena di sana sudah melakukan pembebasan terhadap lahan-lahan itu.

Selain itu, kami juga berharap di daerah kami karena daerah sungai ya daerah yang apa banyak menggunakan kendaraan terhadap pembangunan halte ini perlu untuk dilanjutkan Pak sesuai dengan kemampuan. Karena ini banyak juga mendukung terhadap apa terhadap fasilitas, transportasi masyarakat.

Dan, mungkin yang hal-hal lain berkaitan dengan ini nanti setelah rapat dengan Dinas Teknis akan kami sampaikan berkaitan dengan beberapa program yang ada di sana, baik itu dari laut maupun darat dan yang lain. Kalau

kereta api soalnya Kalimantan kayaknya sudah, sudah mulai ditinggalkan itu program kereta api, sampai saat ini saya kira tidak berkelanjutan ini, Pak Dirjen.

Tidak tahu apakah langsung program kereta api ini, dulu saya 10 tahun yang lalu awal di DPR ini cukup menggema kereta api Kalimantan, tapi sampai saat ini kayaknya memang agak sedikit mandek berkaitan dengan itu, tetapi kami memaklumi dan tentu kita harus mencari di mana sisi prioritas dalam rangka untuk mempercepat terhadap pembangunan kita. Dan, yang terakhir tentu kami mendukung terhadap program percepatan penyelesaian terhadap pembangunan infrastruktur di daerah Ibukota yang baru, IKN.

Terima kasih sekian.

*Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Syarief.

Ibu Sadarestuwati, siap-siap Pak Ilham Pangestu.

F – PDIP (Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.MA.):

Terima kasih, Pimpinan.

***Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi setengah siang,
Salam sejahtera untuk kita semua.***

**Yang saya hormati, Pimpinan beserta seluruh Anggota Komisi V, dan juga
Yang saya hormati, Pak Menteri Perhubungan beserta jajaran,**

Melihat hampir semua bukan hampir, semua Kementerian Lembaga mengalami penurunan anggaran, di mana Kementerian Perhubungan ini juga tidak luput dari pemotongan anggaran ini dengan anggaran yang ya boleh dibilang semakin kecil, tentunya Kementerian ini harus lebih cermat, lebih cermat dan lebih cerdas dalam mengalokasikan anggarannya dan tentunya harus didukung oleh sumber daya manusia yang sesuai dengan penempatannya, sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya, kapabilitasnya, sehingga apa, dengan anggaran kecil ini bisa berkerja dan dihasilkan, bisa dihasilkan apa namanya *output* yang, yang maksimal.

Karena melihat kecenderungan akhir-akhir ini saya melihat di Kementerian Perhubungan beberapa waktu, ini saya terkaget-kaget karena seperti yang pernah saya sampaikan kepada Pak Menteri bahwasanya di sini ada sekolah, ada sekolah-sekolah yang didirikan oleh Kementerian Perhubungan, yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan yang tentunya adalah untuk mencetak tenaga-tenaga profesional, tenaga-tenaga yang handal

di bidangnya masing-masing, sehingga tidak pas menurut saya ketika pada penempatan akhirnya harus di apa diacak sehingga bekerja tidak bisa optimal karena tidak sesuai dengan kemampuannya.

Maka dari itu saya minta Pak Menteri bisa segera menata kembali agar Kementerian ini bisa berpacu, bisa berlari untuk mengejar ketertinggalan yang kemarin dengan anggaran yang kecil ini.

Dan, untuk selanjutnya berkaitan dengan program Pak Menteri, saya juga langsung ingin menyampaikan bahwa di tempat saya, saya langsung ke Dapil saya yang beberapa kali terjadi kecelakaan di Sungai Brantas, di mana kapal, bukan kapal ini, getek yang menyeberangkan orang dan kendaraan kemudian terbalik ini beberapa kali, dan baru-baru ini satu keluarga juga meninggal karena itu.

Maka saya beberapa waktu yang lalu minta kebijakan dari Pak Dirjen Perhubungan Darat untuk memberikan kapal penyeberangan kecil saja, saya tidak bicara kapal besar, kapal kecil yang bisa apa aman, memberikan keamanan dan kenyamanan bagi penyeberang. Karena memang ini satu-satunya jalan mereka untuk bisa memotong apa jalur untuk lebih pendek lagi, karena kalau tidak berpuluh kilometer mereka harus berputar. Maka dari itu tolong ini bisa diperhatikan.

Kemudian juga, Pak Menteri berkaitan, saya yakin seluruh Anggota juga akan berpikir seperti saya bahwa daerah kami juga mengalami apa namanya, sering mengalami kecelakaan khususnya di malam hari, sehingga butuh penerangan jalan di waktu-waktu, di tempat-tempat tertentu, termasuk salah satunya adalah Jembatan Ploso yang baru kita, baru diresmikan oleh Menteri PUPR.

Saya juga sudah menyampaikan bahwa, jangan sampai terjadi kecelakaan dulu baru dipasang lampu, karena lampu yang dipasang memang sedikit sekali sehingga kemarin terjadi kecelakaan saya kemudian ditegur kembali agar bisa segera ditambah. Tidak banyak, begitu juga dengan terminal-terminal yang ada tolong itu bisa segera diselesaikan, termasuk yang terlanjur mangkrak dan apa namanya butuh percepatan, sehingga tidak menunggu waktu yang semakin lama.

Saya kira itu dari saya, Pak Menteri. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya akhiri.

*Wabillahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Bu.
Pak Ilham Pangestu, siap-siap Bu Cen Sui Lan.

F – P. GOLKAR (ILHAM PANGESTU):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,

**Yang terhormat Pimpinan Komisi,
Pak menteri beserta jajaran,
Teman-teman Komisi V yang fisik maupun yang *virtual*.**

Pak Menteri, dua hari lalu saya ditelpon oleh para ulama. Mereka titip salam dan tolong sampaikan kepada Pak Merti dan perjuangkan Pak Ilham mengapa Bandara Sultan Iskandar Muda belum bisa mengirimkan jamaah umrohnya dan belum bisa rakyat Aceh berniaga ke luar negeri, padahal pada Tahun 2019 Aceh mengirim jama'ah umrohnya sekitar 77.500 orang dan dikarenakan Covid, masyarakat dan Pemerintah Aceh memaklumi bahwa Sultan Iskandar Muda tidak, belum boleh masuk dari luar, Pak. Sekarang Covid sudah melandai, bandara-bandara di tempat lain sudah dibuka, mengapa Aceh belum juga dibuka untuk jama'ah umroh.

Ulama dan masyarakat Aceh itu berpegangan teguh pada hasil kesepakatan antara Aceh dan Pemerintah Pusat, salah satu kewenangan Aceh sebagaimana yang tercatat dalam MoU Helsinki poin 1, 3 dan 7 berbunyi, "Aceh akan menikmati akses langsung dan tanpa hambatan ke negara-negara asing melalui laut dan udara."

Kemudian, dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh pada Pasal 165, Pasal 1 berbunyi, "Penduduk Aceh dapat melakukan perdagangan dan investasi secara *internal* dan internasional sesuai peraturan dan perundang-undangan."

Maka dengan ini, saya berharap kepada Pak Menteri untuk dapat menghormati hasil kesepakatan antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat demi keberlangsungan pembangunan, demi keberlangsungan ekonomi dan demi kesejahteraan Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih.

Dan, yang kedua saya menyampaikan beberapa program tentang Bandara Simeulue pembangunan *runway* dan lain-lain, dan tentang terminal yang ada di Aceh.

Terima kasih, Pimpinan. Saya akan menyampaikan usulan.

KETUA RAPAT:

Silakan-silakan. Tolong fotonya foto. Oke mantap.

Silakan Bu Cen Sui Lan.

F – P. GOLKAR (CEN SUI LAN):

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan dan teman-teman Komisi V,
Yang saya hormati Pak Menteri Perhubungan dan jajarannya,**

Pak Menteri, saya langsung. Saya mendengar pemaparan Pak Menteri mengenai bandara perintis untuk daerah yang diharapkan dibiayai BUMD dan swasta. Saya cuma ingin menyampaikan, Pak Menteri.

Kalau kita mengharap swasta, tentunya kita harus memikirkan swasta itu bekerja investasi berdasarkan apa ada *benefit*-nya. Kalau kita mengharapkan BUMD, kita tentu tahu banyak BUMD yang memang kesulitan, perlu injeksi dana dari Pemda. Jadi tentunya dengan visi misi pemerataan, pemerataan untuk daerah terisolir akan agak sulit. Yang saya rasa kita harus prioritaskan adalah bandara-bandara perintis yang sudah kita bangun, bagaimana bisa menambah rute, bagaimana mereka bisa eksis, karena saat ini saya lihat banyak bandara perintis itu rute-rutenya itu kadang-kadang ada kadang-kadang nggak, jadi kita harus intervensi, Pemerintah harus intervensi.

Yang kedua untuk di Dapil saya, Pak Menteri. Pak Menteri untuk bandara di Natuna, bandara Ranai masih *enclave*. Tolong Pak Menteri bagaimana ada solusinya supaya ada pemisahan, karena tentunya untuk meningkatkan perekonomian. Saya tidak menyebutnya bagaimana, tentu Pak Menteri udah berkali-kali tahu, itu bagaimana tolong solusinya Pak Menteri, kalau yang lain-lain tidak ada itu aja Pak Menteri.

Cuma saya ingin menyampaikan di Perhubungan Udara Tahun 2022 untuk Kepri itu hanya 5 Miliar anggaran, jadi tolong Tahun 2023 tolong bisa diprioritaskan lagi Pak Menteri, karena kereta api di tempat saya tidak ada, masa anggaran saya sekecil itu. Tolong dibantu Pak Menteri.

Terima kasih dari saya. Terima kasih, Pimpinan. Itu saja.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Bu.

Pak Dedi Wahidi, siap-siap Pak Tamanuri. Dedi Wahidi ada? Silakan, Pak.

F – PKB (H. DEDI WAHIDI, S.Pd.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Ketua dan Pimpinan Komisi V yang saya hormati,
Rekan-rekan Anggota Komisi V baik yang fisik maupun *virtual* yang saya hormati,
Pak Menteri dan seluruh jajaran yang saya hormati.**

Langsung saja sesuai dengan arahan Ketua, saya langsung pada pokok masalah. Yakni Pak Menteri di Dapil saya di Indramayu, Cirebon banyak jalan kereta yang melintasi jalan tidak ada palang pintunya, yakni di Indramayu saya catat ada 13, di Cirebon ada 13, hampir setiap tahun memakan korban. Dari itu mohon segera dibuatkan palang pintu, Pak Menteri.

Yang kedua, ini juga hasil kunjungan Dapil perorangan ada di Indramayu ada satu *underpass* kereta terlalu rendah sehingga bus gak bisa lewat, di Cirebon bahkan truk juga *coal diesel* nggak bisa lewat. Ada dua, kalau di Indramayu itu Jatibarang Indramayu, kalau di Cirebon itu adanya di Kaliwedi.

Kemudian PJU, Pak Menteri. Jalan nasional di Indramayu dan Cirebon banyak yang tidak ada PJU-nya, perlu ada PJU. Kalaupun pakai PJU yang pakai surya itu Pak Menteri banyak dicuri orang, jadi saya usul memakai PLN aja, Pak Menteri. Karena banyak kecelakaan akibat daripada lubang jalan, kemudian banyak juga penjambret, juga begal motor, Pak Menteri dan itu mohon Indramayu sampai Cirebon untuk dipasang PJU.

Kemudian yang ketiga, yang keempat bus sekolah Pak Menteri, mohon terus dianggarkan, masih dibutuhkan sekali.

Yang terakhir Bandara Kertajati, yang katanya bandara internasional Pak Menteri ini kapan bisa difungsikan untuk penerbangan domestik maupun juga internasional, khususnya haji dan umrah karena embarkasi haji sudah hampir selesai dibangun di Indramayu, kapan kira-kira ini difungsikan karena ini kekeliruan menurut saya Pak Menteri, maka kekeliruan itu dipercepat jadi mestinya jalan tol dulu baru bandara, ini bandara dulu jalan tol nya menyusul masalahnya banyak sehingga tidur bandaranya.

Makasih, mohon maaf Pak Menteri. Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

F – P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Walaikumsalam,

Silakan, Pak Tamanuri.

F – P. NASDEM (Drs. H. TAMANURI, M.M.):

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

**Yang saya hormati Ketua dan para Pimpinan, serta
Kawan-kawan Anggota Dewan,
Yang terhormat Pak Menteri beserta seluruh jajaran.**

Saya langsung saja. Sebagaimana pengalaman kita melihat penyebrangan Bakauheni dan Merak pada waktu Idul Fitri yang lalu memakan waktu beberapa jam terhampar ribuan kendaraan dan terlambat

penyebrangan. Oleh karena itu, saya ingin menanyakan kepada Pak Menteri apakah ada rencana-rencana lain untuk mengantisipasi ini di masa yang akan datang atau bagaimana.

Kedua, mohon bantuannya jalan dari *airport* apa Meranti sampai ke Kota Bandar Lampung lebih kurang 19 Kilo ini kalau malam gak ada lampu jalannya Pak, gelap gulita. Nah, ini kalau memang ada di apa satuan di Kementerian Perhubungan mohon kiranya bisa dibantu.

Kemudian, kami mendorong sepenuhnya bahwa rencana Pelabuhan Tanah Merah yang ada di Kabupaten Mesuji untuk menghubungkan dengan Pulau Bangka ini supaya bisa dipercepat penyelesaian sehingga bisa digunakan karena melihat kondisi yang ada di Kabupaten Mesuji sangat memerlukan itu.

Kemudian, mengenai terminal Betang Subing yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, yang berdempetan dengan jalan tol, harap kiranya bisa difungsikan kembali, bukan difungsikan, dibangun kembali, karena dulu sudah dibangun oleh Pemerintah daerahnya, kemudian karena apa hal-hal tertentu tidak diteruskan dan sekarang ini mubazir karena banyak gedung-gedung yang sudah hampir rusak. Ini harapan saya adalah supaya bisa di-*take* langsung oleh Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Darat bisa dibangun kembali karena kepadatan lalu lintas yang ada di jalur negara, kalau jalan tol gak kena itu.

Jadi dengan adanya perbaikan-perbaikan terminal ini, termasuk juga terminal yang ada di Bandar Lampung, terminal Rajabasa. Kalau dia memang sudah berfungsi sebagaimana layaknya, maka tidak ada terminal bayangan. Kita kasihan itu jalan dari tugu Radin Inten ke arah Pelabuhan Radin Inten itu penuh di pinggir jalan itu, bus-bus yang dia, yang minggir di situ. Jadi terminal Rajabasa sendiri tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Saya tidak tahu apa, kenapa nah ini.

Saya rasa demikian, Pak, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wabillahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

F – P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Terima kasih, Pak.

Pak Muhammad Fauzi.

F – P. GOLKAR (MUHAMMAD FAUZI, S.E.):

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang terhormat.

Umroh kemarin, Pak Ketua.

**Yang terhormat para Wakil Ketua,
Yang saya hormati teman-teman Komisi V,
Yang saya hormati Bapak Menteri beserta jajarannya.**

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, saya langsung saja. Yang pertama Pak Menteri, Kementerian Bapak mendapat pagu indikatif sebesar 33,2 Triliun di Tahun 2023 ini, Pak. Nah, saya ingin tanyakan Pak, kalau saya lihat Pak kendala utama Bapak yang paling besar adalah apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani di mana ada angka kurang lebih 44% kemungkinan inflasi, Pak. Nah, kira-kira kontribusi apa di Kementerian Bapak untuk menekan itu, Pak. Itu yang pertama, Pak.

Kemudian saya masuk ke Dapil, Pak. Pertama saya cukup senang, kebetulan saya bukan orang baru Pak, saya orang lama, cuman dua minggu saya pindah, Pak. Apa saya cukup senang tadi Bapak menyampaikan kereta api Parepare – Makassar rencananya November beroperasi, Pak. Nah itu saya tunggu Pak, mungkin sama temen-temen dari Dapil Sulsel 1, 2, 3, mudah-mudahan itu tidak-tidak apa, tidak terjadi mundur, Pak.

Kemudian Pak saya ingin juga minta informasi dari Bapak mengenai kapal terbalik Pak di ladang pertiwi di tanggal 25 Mei Tahun 2022 Pak yang belum lama ini, Pak. Nah, apa kurang lebih jumlah penumpang ada sekitar 50 orang, selamat 31, 4 meninggal, 3 sudah terindikasi, 1 belum, 15 masih dalam pencarian. Di sana dijelaskan bahwasanya disebabkan cuaca ekstrem dan kehabisan bahan bakar, Pak.

Kemudian saya ingin bertanya Pak, apa benar ini sebenarnya bukan kapal penumpang Pak ini kapal barang. Nah, kemudian kapal ini juga saya dengar-dengar juga tidak ada izin berlayar Pak, nah kenapa ini bisa lolos Pak, gitu loh dan kira-kira apa yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan terhadap permasalahan ini Pak, sementara polisi menetapkan kalau tidak salah apa pemilik dan nahkoda Pak ya, itu, yang lainnya saya gak tahu prosesnya seperti apa karena itu saya minta informasi dari Bapak dan bagaimana asuransi mereka, itu tentang kapal. Saya singkat-singkat saja, Pak ya.

Kemudian di utara Pak, di Dapil saya Pak itu ada terminal, terminal Masamba Pak, itu jarang sekali angkutan umum masuk ke dalam sana Pak karena fasilitasnya masih sangat-sangat kurang, Pak. Nah karena itu saya minta tolong untuk disempurnakan Pak, sehingga angkutan umum itu bisa masuk di terminal, Pak.

Kemudian juga sama dengan Pelabuhan Munte Pak, *alhamdulillah* sekarang sudah beroperasi walaupun belum ada izin Pak, sekarang lebih banyak dipakai oleh sawit di sana, karena pabrik sawit di sana sekarang sudah ada 5 jadi pemberangkatannya salah satu dari Munte, Pak. Nah, kenapa ini belum ada izin, karena memang belum ada Syabandarnya di sana Pak,

sementar untuk izin katanya harus ada laporan dari Syabandar setelah itu baru keluar izinnya.

Kemudian ada beberapa hal yang harus memang juga di, dipenuhi Pak sehingga lebih lengkap terminal apa bandara di Munte Pak, salah satunya adalah perpanjangan dermaga. Nah, karena terminal ini juga awalnya untuk penumpang sekarang sementara dipakai barang, diharapkan juga ada terminal penumpangnya Pak, terminal peti kemasnya dan gudang peti kemasnya Pak dan kalau itu sudah terpenuhi mungkin akan sangat membantu perekonomian di daerah itu dan sekitarnya.

Terakhir Pak, saya ingin mengetahui Pak progres kargo yang pernah saya usulkan juga Pak, kargo darat Pak antara Masambas, Siko, Rampi Pak, ini saya juga ingin informasinya progresnya sejauh mana. Kemudian banyak warga di Rampi, Pak, yang menginginkan kalau bisa ada rute kembali Palu Pak, karena banyak orang Rampi yang tinggal di Palu Pak, mereka minta menghadap ke saya untuk kalau bisa dibuka lagi jalur Rampi – Palu.

Terakhir Pak, ada penyerahan ban, apa bandara dari PT Vale kepada Pemerintah di Sorowako, Pak. Nah, kalau penyerahannya model begini Pak, kira-kira statusnya dan operasionalnya seperti apa Pak, saya juga ingin tahu informasinya.

Yang terakhir ini Pak, ada bandara buah, Pak. Kemarin waktu saya mengusulkan *alhamdulillah* tiga terakomodir di Luwuk utara, buah ini ada di Luwuk, kalau itu sekarang giliran buahlah Pak untuk diperhatikan.

Yang oh ini Pak satu lagi Pak, kargo lagi Pak, kargo yang sekarang ini ada kan Pak kargo Rampi, Seko, Masamba, nah cuman pelaksanaannya ada yang datang ke saya, Pak. Di sana pelaksana teknisnya dia temen-temen ter, apa, bandara Masamba melibatkan, tidak melibatkan Bumdes, hanya melibatkan koperasi bandara. Nah, ini bagaimana, Pak. Sebenarnya katanya ada aturan yang harus melibatkan BUMDes. Saya pikir itu, Pak Ketua.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

F – P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Terima kasih, Pak Fauzi.

Pak Irmadi Lubis.

F – PDIP (H. IRMADI LUBIS):

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan,
Rekan-rekan Anggota Komisi V,
Pak Menteri Perhubungan beserta seluruh jajarannya.**

Saya karena Ketua Poksi saya tadi Pak Bob katanya meminta satu aja belum tentu, maka saya tidak minta apa-apa, Pak. Jadi saya sehubungan dengan apa tadi ada, tadinya saya enggak mau itu apa tapi karena Pak Tamanuri dan Pak Fauzi tadi menyebutkan persoalan terminal jadi saya kira di daerah, di Dapil saya.

Di kampung saya itu Pak, di Pematangsiantar sekali lagi saya ulangi, itu dari mulai dibangun dulu tidak pernah dipergunakan sampai sekarang dihancurkan lagi dibangun lagi Pak, tidak juga pernah digunakan. Di Tebing Tinggi di daerah pemilihan saya di Bandar Kajum juga tidak berfungsi, apa itu hanya di depan saja untuk meretribusi saja. Saya juga tanyakan ke mana, kenapa "Oh ini Pak gak ini." dan memang semua tahu kenapa terminal itu tidak bisa dipergunakan, tidak berfungsi, karena di luar banyak terminal-terminal liar, ada yang jemput ke rumah, ada yang dekat di dalam kota, jadi saya tanya "Pak kami gak punya kewenangan untuk itu." Kata dia dinas LLAJR sana.

Oleh karena itu Pak, tidak supaya kita tidak mengulangi pengalaman kita di Tahun 2009 waktu pembentukan Undang-Undang 2 Tahun 2009 tentang apa lalu lintas angkutan dan angkutan jalan, makanya sekarang sedang dipersiapkan, sedang komisi, sedang mempersiapkan RUU Inisiatif DPR untuk perubahan Undang-Undang itu. Makanya mungkin Bapak-Bapak dari Kementerian Perhubungan bagaimana tahu dulu apanya suatu pembentukan Undang-Undang itu dari pihak Pemerintah ada yang *lobby* sana, ada yang *lobby* sini, ada yang merasa takut kehilangan apanya kewenangannya dan segala macam.

Oleh karena itu saya mohon kepada Pak Menteri, tolonglah ditugaskan dari biro hukumnya untuk mengikuti perkembangan di pembahasan ini dan juga di, di Pemerintah siap, jangan lagi nanti program kita tahun '99 sewaktu mengambil keputusan yang dari instansi ini me-*lobby* Fraksi ini, yang ini ke sana, ini kemari, jadi artinya satu Pemerintah lah dia macam mana bisa kita tertibkan terminal-terminal, terminal-terminal apa di seluruh Indonesia ini berfungsi.

Satu aja ini penyebabnya, Pak. Karena banyak, ngapain orang masuk ke terminal, di luar-luar aja banyak terminal dekat rumahnya, dijemput ke rumahnya juga bisa. Jadi Bapak, sebetulnya terminal itu diapakan saja di *refocusing* saja tidak usah lagi dulu yang lain dulu sampai apa bahwa ada kewenangan dari perhubungan untuk menindak terminal-terminal liar yang ada di luar ini.

Sampai kapanpun Pak, Bapak bangun, bagaimanapun indahnya, orang tinggal nunggu di rumah Pak dijemput sampai ini diantar ke rumahnya, ngapain ke terminal hanya orang bodoh saja. Saya kira orang ke terminal itu harus dipaksa karena tidak ada terminal tempat lain di luar daripada terminal itu.

Terima kasih, Pimpinan.

Terima kasih, Pak Menteri.

Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan.

F – P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Terima kasih, Pak.

Pak Hamka? Keluar. Pak Sudewo.

F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan dan semua kawan Anggota Komisi V yang saya hormati,
Pak Menteri Perhubungan dengan seluruh jajarannya yang saya hormati.**

Pertama, yang ingin saya sampaikan di sini ada ketidakadilan yang terjadi bahwa Menteri Perhubungan hanya Ketua Komisi saja yang diberi peci. Ini *real* ketidakadilan telah terjadi, tapi tidak apa-apa karena yang diberi Ketua Komisi itu Pimpinan saya, ya saya ikhlas saja, apalagi Ketua Komisi itu sejak 2009 sudah bersusah payah dengan saya di sini.

Yang pertama saya ingin mengkritisi demikian Pak Menteri, bahwa apa yang dirancang oleh Pak Menteri di Tahun 2023 itu tampaknya tidak memperhatikan apa yang terjadi di negeri kita yang seharusnya itu menjadi *domain* Kementerian Perhubungan. Sesuatu yang telah terjadi yang sangat memprihatinkan yaitu namanya kecelakaan lalu lintas itu tidak menjadi fokus perhatian Kementerian Perhubungan, apa strategi kebijakan dan program yang akan dilakukan ke depan supaya kecelakaan lalu lintas yang begitu tinggi ini tidak terjadi kembali apalagi kecelakaan lalu lintas yang bersifat fatal, fatalitasnya sangat tinggi itu telah terjadi. Di kurun waktu beberapa bulan Tahun 2022 ini.

Jadi apa gunanya ada anggaran membuat program tetapi kalau pokok persoalan terjadi itu tidak diatasi dengan ketersediaan uang ini. Jadi kembali lagi saya mengkritisi bahwa, sampai dengan ini berarti Menteri Perhubungan hanya fokus pada tataran *output* bukan pada tataran *outcome*. Jadi apa yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan manfaat faedahnya untuk masyarakat luas itu belum dirasakan.

Kalau sudah sampai pada tataran *outcome*, masyarakat luas bisa merasakan segala kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan berupa program, strategi dan kebijakan, itulah merupakan tolok ukur keberhasilan dari Kementerian Perhubungan.

Semua daya upaya yang dilakukan Kementerian Perhubungan yang didukung dengan anggaran yang sangat besar ini, itu ukurannya adalah bahwa kecelakaan lalu lintas menurun itu ukuran utamanya, bahwa terjadinya keamanan dan kenyamanan transportasi baik itu darat, laut dan udara.

Kalau kita kritisi terjadinya kecelakaan lalu lintas darat utamanya di Indonesia ini terdiri dari berapa faktor penyebab, yaitu faktor utamanya adalah masalah sopir dan sopir itu masalah utamanya 80% dari masalah sopir itu adalah kelelahan, yang kedua adalah masalah kondisi kendaraan. Kondisi kendaraan ini harus dibedakan antara layak jalan dengan kondisi teknis kendaraan. Itu berbeda sama sekali, cara pengujiannya pun berbeda.

Yang ketiga adalah faktor pengusaha atau pemilik kendaraan itu sendiri baik bus maupun angkutan barang. Mengapa sampai Kementerian Perhubungan tidak fokus terhadap hal pengatasan kecelakaan ini. Kalau saya lihat ini ada satu kesalahan perencanaan dari awal yaitu kesalahan dari ibu mengandung bukan anak yang dilahirkan. Ibu mengandung itu apa maksudnya, karena dalam Kementerian Perhubungan tidak ada struktur organisasi yang menangani secara khusus soal keselamatan lalu lintas, padahal roh daripada transportasi itu adalah keselamatan, Undang-Undang Lalu Lintas nomor 1 yang diutamakan didahulukan adalah soal keselamatan, tetapi ironis sekali di Kementerian Perhubungan tidak ada yang namanya direktur keselamatan lalu lintas. Kalau andaikata ada Direktur keselamatan lalu lintas, di bawahnya ada subdit keselamatan lalu lintas darat, subdit keselamatan lalu lintas laut dan seterusnya, saya yakin akan fokus terhadap hal yang semacam ini.

Mengapa kecelakaan itu terjadi pasti akan diteliti secara mendalam, kemudian antisipasi melalui strategi dan kebijakan pengalokasian anggarannya pasti akan lebih detail, kemudian cara penanganan kecelakaan lalu lintas pasti akan secara detail. Ini yang terjadi kayak kecelakaan lalu lintas di jalan tol Mojokerto. Itu bukan persoalan semata-mata karena sopir, karena pengusahanya sendiri kontrak dengan pengguna itu dalam durasi yang sangat pendek, yang tidak memungkinkan sopir itu istirahat. Ini kan artinya kecelakaan yang sengaja dirancang sedemikian rupa atau pengusaha itu menantang kehendak Tuhan, menantang kehendak Tuhan.

Apakah itu hanya terjadi di Mojokerto saja? Kecelakaan itu, tidak, terjadi di mana-mana bahwa bus yang dioperasikan, 60% dari bus yang dioperasikan tidak mempunyai izin. Hampir semua bus wisata itu kontraknya menantang Tuhan, hampir semua bahwa *driver* yang menjalani itu adalah kelelahan, tapi anehnya Menteri Perhubungan diam begitu saja tidak ada upaya sama sekali bagaimana menyelesaikan dan saya lihat dengan pemaparan anggaran 2023 juga tidak ada fokus semacam itu. Nyawa sangat berarti dan itu amanah Undang-Undang soal keselamatan jalan. Jadi ini memang perlu ada satu penanganan secara serius dari Kementerian Perhubungan, itu yang pertama.

Yang kedua, soal tarif angkutan barang yang sangat tinggi, yang sangat dikeluhkan oleh masyarakat secara luas maupun oleh para produsen komoditi itu Pemerintah juga tidak ada strategi dan kebijakan bagaimana menentukan tarif barang ambang bawah maupun ambang atas yang ditentukan oleh Kementerian Perhubungan yang memberikan satu kepastian ekosistem transportasi dan logistik itu betul-betul baik, sama sekali tidak ada.

Jadi, Pemerintah itu selama ini sebenarnya tahu terhadap hal yang semacam ini. Coba Pemerintah juga memberikan pemaparan kepada kita, sebenarnya angkutan barang itu berapa jumlahnya. Yang plat hitam aja berfungsi sebagai angkutan barang, coba berapa jumlahnya. Di situ kita juga akan tahu hubungan industrial antara sopir ya dengan perusahaan. Sopir ini diperlakukan sebagai karyawan secara *formal* oleh perusahaan atau ini *free* sehingga bebas dari segala tanggung jawab, ini juga oleh Kementerian Perhubungan tidak disentuh sama sekali.

Termasuk juga ongkos tarif atau ongkos barang angkutan laut. Ini juga tidak ditentukan oleh Pemerintah sama sekali, sehingga angkutan logistik, angkutan transportasi itu baik laut itu ongkosnya menjadi sangat tinggi.

Kita tahu bahwa, *cost* logistik di Indonesia Pak Menteri, itu tertinggi di dunia. Di Amerika, di Vietnam, di Thailand, di Malaysia, di Singapura, dan di mana-mana Indonesia yang tertinggi, sehingga ini tidak memberikan daya saing perekonomian bangsa. Pabrik-pabrik besar yang ada di Indonesia itu bahkan membeli barangnya, *raw material* nya itu tidak dari produk Indonesia, tetapi dari impor dari negara-negara lain.

Tapi mengapa Kementerian Perhubungan diam saja begitu terhadap hal yang semacam ini. Harusnya ini merupakan *domain*-nya Kementerian untuk memberikan daya saing Indonesia terhadap internasional.

Saya juga belum mendapatkan satu pemaparan dari Kementerian Perhubungan. Ini marak bahwa target Pemerintah, target Presiden, bahwa IKN 2024 itu harus sudah berada di sana, tetapi dari Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2023 tidak nyenggol sama sekali apa yang akan dilakukan Kementerian Perhubungan untuk IKN. Kita tahu bahwa stok material saja, orang yang akan ke Ibukota Negara yang baru saja dermaganya yang mana susah, untuk *supply* material yang membangun di sana dermaganya tidak jelas, ini *domain* dermaga ini *domain* nya Kementerian Perhubungan ataukah *domain*-nya Kementerian PUPR ataukah Kementerian yang lain. Menurut hemat saya ini *domain* nya Kementerian Perhubungan, tapi tidak terlihat sama sekali oleh Kementerian Perhubungan menyenggol hal yang semacam ini.

Termasuk hal ketegasan Kementerian Perhubungan soal jembatan timbang, Pak. Jembatan timbang ini saya melihatnya ada ketidakadilan diperlakukan oleh Pemerintah di jembatan timbang. Jadi kendaraan itu kalau uji terhadap kendaraan dengan sistem sampel itu mencerminkan tidak, ketidakadilan Pak Menteri.

KETUA RAPAT:

Izin, Mas Dewo.

F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Apalagi kalau. Sebentar ya Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Mungkin bisa dipersingkat ya, sudah 15 menit.

F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Iya. 2, jam 2 kan Menteri selesai kan?

KETUA RAPAT:

Masih banyak 20 orang belum ngomong.

F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Ya.

Pak Menteri, jembatan timbang itu menunjukkan ketidakadilan Pak Menteri kalau caranya semacam ini, tapi tolong Pak Menteri rubah itu sistem dari manual menjadi otomatis itu, sehingga jembatan timbang itu semua kendaraan yang lewat di situ dengan kontrol secara singkat tetapi akurat itu bisa diberlakukan. Kalau ada yang dicek kemudian ada yang tidak dicek itu Pak, itu berarti menunjukkan ketidakadilan. Apalagi dia kena apes, pas dicek ditemukan melanggar aturan, itu kena apes dua kali, itu tolong diperhatikan oleh Pak Menteri.

Kemudian, masukkan saya yang berikutnya Pak Menteri.

KETUA RAPAT:

Yang terakhir.

F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Bandara Cengkareng ini kan antre baik mau terbang maupun *landing*. Kejelasan untuk membangun *runway* ketiga itu bagaimana, Pak Menteri.

Kemudian Pak Menteri tadi menyampaikan bahwa, kereta Parepare – Makassar akan operasional bulan November, tetapi yang saya tahu lelang dua kali di situ sudah ditentukan pemenangnya tapi dibatalkan, bagaimana November bisa dioperasionalkan. Ini tolong kalau memang omongan saya salah diluruskan, tapi kalau Pak Menteri memang yang benar tolong juga diberikan penjelasan lebih lanjut.

Kemudian terakhir saya memberi masukan kepada Pak Menteri. Sekarang ini banyak sekali Dirjen-Dirjen yang Plt, jangan sampai pengisian nanti Dirjen tersebut tidak kompeten, Pak. Jadi laut yang memang betul-betul laut, darat ya betul-betul darat, kalau bisa calon Dirjen itu diberi pakta integritas dengan pekerjaan tertentu. Kalau memang tidak sesuai dengan pakta integritas, segera pula dihentikan Pak. Wanti-wanti saya sesuaikanlah kompetensi betul-betul dan apa yang diberikan oleh Bu Sadarestu kalau

memang itu kereta dari awal Pak ya kereta, sekolah kereta ya kereta, sekolah darat ya sekolah darat jangan sampai diacak seperti itu karena mengganggu kinerja, Pak. Penyesuaian untuk bekerja di porsi yang lain itu membutuhkan waktu yang sangat lama dan itu berdampak kepada pelayanan masyarakat luas. Saya kira itu, Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Mas Dewo.

Saya tahu terakhir dia sudah lari kencang supaya cepat selesai.

Baik selanjutnya Pak Hamka sudah ya? Belum? Silakan Pak Hamka. Ini Pak Hamka perlu bicara sama kita ini terkait siklus ini. Silakan, Pak Hamka.

F – P. GOLKAR (Drs. HAMKA BACO KADY, MS):

Makasih, Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Pimpinan dan seluruh Anggota yang saya hormati, dan
Saya banggakan Pak Menteri, Pak Dirjen dan seluruh jajaran yang hadir
pada kesempatan ini,**

Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa, anggaran Kementerian Perhubungan sebesar, sebenarnya tidak turun dibanding Tahun 2022, tidak turun, malah naik sedikit ya.

Nah, berdasarkan pagu indikatif Pak Menteri, saya mengapresiasi adanya satu langkah terobosan merestrukturisasi ya, merestrukturisasi anggaran, stuktur anggaran yang ada, yang awalnya Dirjen Perhubungan Darat cuma 4 koma, dinaikkan menjadi 5 koma, 5 koma sekian T, itu bagus karena saya melihat bahwa struktur anggaran ini harus memang lebih fokus dan lebih efektif sesuai apa yang menjadi anggaran pprioritas ada Tahun 2023, yang diantaranya adalah penyelesaian target PSN, PEN, program prorakyat dan pembayaran tunggakan dan dukungan pembangunan IKN.

Ini tolong Pak Menteri dengan sasaran dan prioritas ini dukungan pembangunan IKN ini yang ditanyakan Pak Dewo tadi itu memang harus kita konkritkan pada pembahasan teknis tadi. Memang mungkin di sini belum, tetapi semangatnya sudah ada di dalam pengantar, itu kita apresiasi. Nanti pendalaman ini wujud daripada dukungan terhadap pembangunan IKN itu seperti apa, itu saya pikir nanti pada saat pembahasan teknis, itu yang pertama Pak Menteri. Saya dua poin dalam struktur anggaran ini saya apresiasi dalam restrukturisasi dan prioritas anggaran.

Yang kedua mengenai pagu indikatif. Pagu indikatif itu yang dipaparkan di sini dan juga sesuai dengan surat edaran Menteri Keuangan, Menteri Keuangan dan Bappenas, rupiah murni itu cukup besar, Pak Menteri ya. PNBPN itu 3,5 dan seterusnya, dan seterusnya sehingga menjadi 33,21.

Yang ingin saya sampaikan dalam struktur pagu indikatif ini adalah terkait PNBPN dan SBSN. Kalau memperhatikan paparan Pak Menteri pada halaman terakhir tadi, itu ada rencana penerimaan PNBPN itu 8 koma sekian T, yang masuk di sini dianggarkan hanya 3 koma sekian, 3 koma, 3,5 T. Tentu saya, saya memahami itu semuanya, dan sekaligus saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan pada Pak Menteri atas penerimaan PNBPN yang ada pada dua tahun terakhir ini, walaupun posisi pandeminya yang cukup berat kita hadapi, tapi Bapak menunjukkan PNBPN yang cukup tinggi.

Hanya saja nanti Pak Menteri, kita harus mendalami ini Pak Ketua. Ini ada 8 koma sekian T loh PNBPN yang direncanakan oleh Pak Menteri. Nah bagaimana cara memperolehnya, ayo kita sama-sama pikirkan. Masih banyak potensi PNBPN itu dari laut, udara, darat. Investasi sekian tahun ini harus menghasilkan PNBPN dong Pak Menteri ya. Ini saya salut di dalam pemaparan ini ada sekian 8 sekian Triliun yang harus kita cari PNBPN nya dan jujur saya menyatakan bahwa baru-baru ini Badan Anggaran telah menyetujui 427 Triliun penambahan APBN 2022 sehingga APBN kita ini 3.100 Triliun 2022, 420 tambahan, berapa PNBPN tambahannya, itu 146 Triliun yang ada di dalamnya Bapak juga ada di situ. Sayangnya semua tambahan anggaran ini tidak ke Bapak, hanya dilarikan supaya menekan subsidi dan memberikan Pertamina 357 Triliun untuk menekan Peralite tidak turun.

Ini saya apresiasi dan kami akan dalam. Nanti Pak Ketua kita harus pikirkan baik-baik bagaimana PNBPN ini lebih besar lagi yang harus diperoleh dari Kementerian Perhubungan.

Yang ketiga, mengenai kereta api. Saya kira Pak Menteri perlu dilanjutkan kalau memang beroperasi nanti Makassar apa Maros, Makassar, Parepare, Makassar – Parepare, saya kira itu masyarakat sangat berharap dan saya kira keseriusan Pak Menteri luar biasa dan mudah-mudahan itu kami doakan, kami dukung sepenuhnya bagaimana itu bisa terlaksana dengan baik.

Saya belum masuk kepada Dapil Pak Menteri, nanti secara teknis saya akan usulkan. Ada satu Dapil saya apa namanya saya berikan terima kasih karena sudah di *follow up* oleh Pak Dirjen dan sekaligus Pak Sekjen yaitu Penlok Bandara Kayuadi, Kabupaten Selayar.

Saya kira itu untuk sementara, Pak Ketua. Yang saya garisbawahi kita dalam, masih dalam proses penyusunan anggaran, kita optimalkan bagaimana Kementerian Perhubungan memperoleh PNBPN yang besar sehingga anggarannya juga bisa kembali kepada Kementerian Perhubungan.

Demikian terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Hamka.

Ini dibantu Pak supaya sebanyak-banyaknya bisa berhubungan PNBPNya, pemanfaatannya, supaya ya keciprat juga komisi ini bisa ngusulin banyak program kan.

Baik supaya tidak berpanjang-panjang selanjutnya Pak Aras. Aras yang kiri ya bukan Aras yang kanan ya, Aras yang kiri. Silakan, Pak Aras. Nanti kalau yang improvisasi kita gak usah terlalu banyak, konkrit, kalau ada yang diserahkan nanti cepat diserahkan, silakan.

F – PPP (Dr. H. MUH. ARAS, S.Pd., M.M.):

Terima kasih.

**Yang terhormat Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V,
Yang saya hormati Pak Menteri dan seluruh jajaran Eselon I, dan
Seluruh hadirin yang sama berbahagia.**

Pertama-tama, tentu kami mengapresiasi seluruh kegiatan-kegiatan Kementerian, yang paling utama adalah bagaimana yang menyentuh ke Dapil kami tentu menjadi bagian daripada perjuangan-perjuangan bersama baik teman-teman dari Komisi V maupun teman-teman dari Kementerian Perhubungan.

Yang kedua adalah Tahun 2023 adalah merupakan tahun politik, Pak Menteri. Ya tentu kami dari berbagai Dapil sangat membutuhkan dukungan baik moril dan sebagainya terkait dengan persiapan kami untuk bisa menghadapi Tahun 2024.

Jadi berharap bahwa, kegiatan-kegiatan Padat Karya dan kegiatan-kegiatan di Dapil ini bisa dimaksimalkan sehingga ada sinergitas yang terbangun antara kami dengan Kementerian, sehingga pada akhirnya mereka mengapresiasi juga keberadaan kami di Komisi V.

Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kereta api di Sulawesi Selatan. Berterima kasih telah dilaksanakan semaksimal mungkin, sehingga *Insha Allah* menurut laporan dari Pak Gubernur dan Pak Walikota Makassar kemarin dan beberapa Bupati tanggal 10 Oktober katanya ingin diresmikan dari Maros sampai ke Barru.

Nah, untuk program Tahun 2023, kami berharap bahwa tetap dilanjutkan untuk Maros – Makassar dan Barru – Parepare sehingga ini bisa berkelanjutan, sehingga Tahun 2024 mudah-mudahan semuanya tuntas.

Laporan terakhir kemarin dari Pak Walikota bahwa belum disepakati terkait dengan lokasi dan sistem penyelesaian untuk kota Makassar, mudah-

mudahan hasil kunjungan Pak Menteri kemarin sudah ada solusi, sudah ada jalan keluar, sehingga harapan kami bahwa jangan pernah berhenti karena kapan apa, kapan itu berhenti maka bisa jadi 2024 akan panjang lagi waktunya untuk bisa diselesaikan dari Makassar sampai Parepare.

Yang berikutnya adalah di Sulawesi Selatan terutama pada poros Makassar melalui Kecamba. Ini kan gelap gulita, Pak Menteri. Lalu saat ini hampir setiap malam terjadi kemacetan di poros itu, di hutan dan tanpa penduduk, sehingga sangat membutuhkan penerangan di sana. Bayangkan kalau sudah gelap gulita seperti itu, di tengah hutan pasti siapa saja pasti rawan terkait dengan hal-hal yang tidak diinginkan, mohon perhatiannya.

Begitu juga di Makassar Parepare yang sudah dua jalur sering terjadi kecelakaan yang menabrak *median* jalan, karena kurangnya penerangan Pak Menteri sehingga ini butuh perhatian khusus, sehingga kendaraan-kendaraan terutama di musim penghujan ini kadang-kadang tidak melihat ada median jalan, sehingga kendaraannya bisa naik ke median jalan.

Kemudian, yang selanjutnya adalah ini pandemi ini kan sudah mulai meninggalkan kita *Insha* Allah dan kegiatan-kegiatan ekonomi sudah mulai ramai dan juga begitu juga moda transportasi yang ada di Kementerian Perhubungan mulai udara, darat, laut dan kereta api juga sudah mulai padat, oleh karenanya perlu mitigasi antisipasi daripada Kementerian baik udara, maupun darat, kereta api maupun laut ini sehingga mengurangi kecelakaan.

Penerbangan juga sudah cukup padat, harga tiket juga sudah mengikutinya dan moda transportasi udara yang kemarin sangat apa namanya banyak yang tidak beroperasi, ini kan rata-rata akan dioperasikan kembali. Celaknya adalah biasanya kendaraan atau pesawat yang lama tidak dioperasikan lalu dioperasi kembali biasanya banyak terjadi kerusakan-kerusakan yang tidak teridentifikasi, sehingga mohon lebih diperkuat sistem pencegahan atau perawatan dari moda-moda transportasi yang kami sebutkan tadi untuk menghindari apa namanya kecelakaan-kecelakaan yang tentu akan merugikan kita semuanya.

Barangkali itu Pak Ketua, karena Pak Ketua sudah melirik ke saya jadi saya sudah grogi dan memang sudah mau habis, Pak Ketua.

Terima kasih.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Waalaiikumsalam,

Salah satu tugas Ketua ini melirik, Pak. Pak Ham apa namanya Pak Aras ini saya lirik karena kumisnya bagus, Pak. Maksud saya dengan kumis yang bagus bicara gak usah panjang-panjang begitu Pak.

Selanjutnya Pak Sudjadi. Silakan, Pak Sudjadi. Ini orang tua ini perlu kita kasih di tengah-tengah memberi nasehat kepada kita semua.

F – PDIP (Ir. SUDJADI):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Ketua Komisi Pimpinan yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan.

Bapak Menteri beserta jajarannya yang saya banggakan, saya cintai dan saya hormati.

Satu hal saya bangga Pak Menteri, Bapak sudah mengangkat identitas daerah dengan seragam itu, sayangnya saya cari yang pakai blangkon Solo kok nggak ada. Ada Jogja, tapi kalau Jogja ada mondolannya jadi enggak, enggak enak dipakai.

Saya tidak tanya, saya cuman sifatnya anjar, *anu* anjuran doa dan permohonan. Kepada Pak Je, Pak Menteri saya selamat mungkin barangkali tidak atau sedikit yang tau bahwa beliau mendapat gelar doktor honoris causa bidang perhubungan. Tepuk tangan. Yang memberi gelar universitas yang tidak tanggung-tanggung, Universitas Gadjah Mada.

Yang kedua saya juga mengucapkan selamat kepada Pak Sekjen baru, Pak Sekjen itu juga alumnus Gadjah Mada. Dengan demikian harapan saya hanya satu Pak Sekjen, semoga Kemenhub makin cerah, aspirasi misalnya kereta api sudah bukan janji tapi direalisasi karena pejabat lama sudah pada diganti.

Sekian terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Komisi V kasih *applause* dulu buat Pak Menteri yang mendapat gelar doktor honoris causa. Saya lupa tadi Pak mengucapkan selamat walaupun saya kemarin hadir ya. Mohon maaf Pak Menteri harusnya tadi diawal saya sampaikan.

Saya minta tepuk tangan lagi buat Pak Sudjadi, Pak. Mudah-mudahan dengan para pejabat baru nanti banyak aspirasi Komisi V yang terakomodir ya, itu doanya semuanya Pak ya, yakin doa semua Komisi V itu.

Bu Sri Rahayu, bersiap-siap Pak Syafiuddin.

F – PDIP (SRI RAHAYU):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Ketua dan Wakil Ketua, serta Anggota yang saya hormati,
Pak Menteri dan seluruh jajaran yang saya hormati,
Pak Dirjen.**

Saya langsung tidak banyak, yang pertama adalah pada *slide* halaman tiga yang menyampaikan tentang generasi, semua kelembagaan atau Kementerian arahnya pada generasi, yaitu jurang apa ya perbedaan antara miskin dan kaya ya.

Yang ingin saya tanyakan Pak, dengan program-program yang ada ini yang secara langsung berkaitan dengan generasi karena tentu yang kita perhatikan adalah bagaimana warga masyarakat kecil atau orang kecil itu bisa mendapatkan dampak yang positif tentu dalam kehidupan mereka sehingga mengurangi jurang pemisah atau jarak antara kaya dan miskin sehingga generasinya semakin kecil.

Nah, dari pembangunan-pembangunan yang ada, kalau pesawat terbang itu kan pasti orang-orang yang mampu menengah ke atas yang merasakan dampaknya juga enggak terlalu besar untuk warga masyarakat, kereta api mungkin, sekarang ini sudah banyak fasilitas-fasilitas tapi sebagian besar yang terus dan terus ditingkatkan adalah menengah ke atas.

Nah, kemudian yang ketiga adalah angkutan darat khususnya angkutan yang berkaitan dengan mungkin bus yang sekarang ini juga lagi Pemerintah Pusat atau Kementerian Perhubungan sekarang mengambil alih juga terminal-terminal untuk menjadi terminal kelas A.

Saya ambil contoh tidak jauh-jauh di Dapil saya ada pengambilan, pengambilalihan tipe terminal yang ada di Blitar. Yang saya ingin tanyakan kalau di Blitar itu apa yang mau diambil begitu kemarin itu. Artinya saya mohon diberikan penjelasan, karena di Blitar itu kotanya juga enggak terlalu ini, kemudian jalan-jalan Pak yang menuju Blitar ini jalannya sempit-sempit semua, kecil meskipun itu jalan nasional.

Nah, apakah sudah juga dalam hal ini ketika kita mengambil alih terminal itu apakah juga ada komunikasi koordinasi tentang perluasan jalan raya atau jalan nasional maupun provinsi yang ada kaitanya dengan jalan-jalan yang memang dilewati oleh bus itu, karena kita kan berharap bahwa dengan adanya sarana prasarana itu akan semakin meningkatkan masyarakat yang ada di wilayah yang bersangkutan, tetapi pada kenyataannya belum demikian, masih membangun.

Nah, demikian juga menurut saya kalau itu diambil alih kan beban-beban menjadi beban pusat, meskipun harapannya mendapatkan PNPB ya dari situ, tetapi kalau menurut saya justru bagaimana Pemerintah itu memberikan *support* kepada Pemerintah Daerah yang manajemennya dalam Pemerintah

Daerah, tetapi Pemerintah Pusat tidak terlalu, tidak terlalu mempunyai beban ya.

Karena seperti Surabaya yang diambil alih kan sudah bagus, Surabaya juga mampu untuk itu, tinggal mungkin dengan arahan manajemen ataupun masukan-masukan atau *supporting* dari Pemerintah pusat aja khususnya Kementerian Perhubungan.

Kemudian yang kedua kaitanya dengan BPSDM, ini anggarannya kan cukup besar Pak ya, ada peningkatan dalam hal ini di Tahun 2023 juga. Yang ingin saya tanyakan adalah sebenarnya sampai sejauh mana hari ini kebutuhan-kebutuhan dari Kementerian Perhubungan terkait dengan alat transportasi atau sekolah-sekolah terutama juga yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan SDM yang mungkin harus dipenuhi oleh, apa oleh Kementerian Perhubungan sampai hari ini, termasuk mungkin juga kereta api, mungkin juga lautnya, daratnya, dan seterusnya.

Memang sejauh ini apakah masih linier dalam arti memang kebutuhannya masih tinggi begitu, sehingga ada peningkatan-peningkatan di dalam pelaksanaan ataupun anggaran untuk hal tersebut.

Dan yang terakhir, Pak. Saya juga menyampaikan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan terkait dengan palang pintu kereta api, karena memang ini tidak hanya di Dapil saya, di daerah Jawa Timur juga masih banyak hal-hal semacam itu sehingga sering terjadi kecelakaan memang. Itu sebenarnya kewajibannya siapa, apakah kewajiban dari Kementerian Perhubungan atau dari Pemerintah daerah.

Pemda.

Nah, oleh karena itu, kalau memang Pemda itu juga terus diingatkan kembali karena kalau jalan raya mungkin punyanya ini ya jalan nasional itu kepunyaan Kementerian Perhubungan, tetapi sebagian besar itu kan jalan itu juga jalan besar, jalan besar, tetapi di situ ada kereta api tetapi jalan itu milik daerah. Nah oleh karena itu, mungkin perlu komunikasi dan koordinasi yang intensif untuk itu supaya korban-korban masyarakat ini tidak terjadi dan bahkan juga ada orang yang relawan untuk memberikan bantuan untuk menghentikan mobil, kemudian juga kalau ada orang lewat, terutama juga bukan mobil tapi itu apa orang jalan orang lewat yang memang itu jalan memang apa dipotong oleh jalan kereta api. Oleh karena itu mungkin komunikasi, koordinasi yang lebih intensif untuk itu Pak.

Saya kira terima kasih dan sekali lagi untuk apa bus itu menjadi, menjadi penting Pak, untuk kita, meskipun Tahun 2023 sudah di, sudah dianggarkan barangkali kalau masih bisa ditingkatkan itu akan lebih bagus.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Bu Sri Rahayu.

Pak Syafiuddin silakan dari Madura Raya.

F – PKB (H. SYAFIUDDIN, S.Sos.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siap.

**Yang yang saya hormati Saudara Pimpinan, beserta
Segenap sahabat-sahabat Anggota Komisi V,
Saudara Menteri Perhubungan beserta jajaran.**

Dari ini kayak nganter manten aja, Pak Ketua. Jadi sumringah banget semua jajaran yang hadir di forum yang sangat berbahagia ini.

Alhamdulillah saya pertama-tama ingin mengucapkan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan, melalui Kementerian Perhubungan karena kemarin dua bulan yang lalu telah diresmikan Bandar Udara Trunojoyo di Madura, khususnya di Kabupaten Sumenep.

Namun sedikit koreksi, Pak Menteri. Mohon maaf, ada beberapa yang menurut saya agak ganjil pada waktu peresmian itu, tidak ada satupun Anggota DPR RI dari Dapil Madura, dari 8 orang Anggota tidak diundang mohon maaf ya. Sedikit koreksi itu Pimpinan, karena kita sebagai politisi tentunya adalah momentum yang terbaik adalah bisa bersanding dengan Saudara Presiden, dengan Saudara Menteri, sehingga kita oleh konstituen kita bisa *image*-nya positif seakan-akan, bukan seakan-akan karena memang kesepakatan APBN yang kita berikan kepada Pemerintah itu merupakan kesepakatan dan persetujuan di forum Komisi V ini.

Namun saya berhusnuzon Pak Menteri, mudah-mudahan jawaban Pak Menteri nanti, Pak Syafiuddin tunggu sabar ya mudah-mudahan nanti Pak Presiden hadir lagi ke Madura untuk meresmikan Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan yang ada di Madura, yang sudah masuk di Perpres 80.

KETUA RAPAT:

Saya interupsi dulu nih, tolong dicatat ini Pak Menteri, jangan sampai gak diajak nih Pak, lain kali mesti diajak Pak Syafiuddin ini.

F – PKB (H. SYAFIUDDIN, S.Sos.):

Terima kasih, Ketua.

KETUA RAPAT:

Termasuk teman-teman yang lain.

F – PKB (H. SYAFIUDDIN, S.Sos.):

Siap iya siap, Ketua. Dan membawa doa, mudah-mudahan itu ya Pak Menteri ya.

Yang kedua saya berharap bahwa, atas pesan Presiden terkait dengan peresmian Bandara Trunojoyo ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya daerah terpencil dan khususnya lagi di Madura. Tentunya saya berharap karena di RKA dan RKP ini saya coba dalam nanti mungkin kita lebih perdalam lagi di pembahasan dengan Dirjen-Dirjen terkait. Mudah-mudahan di Madura ini ada, karena ada, tidak ada satupun makhluk Madura di sini.

Saya berharap sesuai dengan pesan Presiden bahwa, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ini kita punya potensi. Pak Menteri, kita punya potensi yang namanya pelabuhan apa Pulau Gili Iyang. Gili Iyang ini adalah sebuah daerah yang oksigennya merupakan terbersih nomor 2 sedunia, setelah apa namanya Yordania kalau gak salah, mudah-mudahan di situ nanti kita pendalaman dengan berapa Dirjen, apakah itu Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut.

Tentunya nanti apakah ada hibah di situ Pak Menteri, hibah untuk kapal-kapal kecil kira-kira untuk bagaimana transportasi dari pelabuhan Tungek ke Pelabuhan Gili Iyang. Kalau itu ada, maka nanti merangsang pertumbuhan ekonomi dengan cara apa, banyak wisatawan-wisatawan yang akan datang ke Madura tentunya, karena ini merupakan sudah diakui oleh WHO bahwa kadar oksigen di Pulau Gili Iyang ini adalah terbersih kedua.

Tentunya mudah-mudahan ini memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat Madura khususnya di Kabupaten Sumenep. Di situ ada Ketua Banggar yang namanya Pak Said Abdullah Pak Menteri, beliau juga saya lihat tidak hadir pada kemarin. Apakah diundang tapi tidak hadir, tapi Pak Syafiuddin saya tanya ke sekwan, tanya ke apa namanya komisi tidak ada, Pak Ketua.

Jadi sekali lagi, saya juga tidak terlalu marah Pak Menteri karena orang Madura biasa di anak tirikan, namun ke depan mohon maaf, mohon maaf Madura ini merupakan daerah miskin ekstrim ada 2 Kabupaten dari 4 Kabupaten, tolong. Siap. Saya berharap mudah-mudahan nanti ke depan Madura ini bisa sejajar dengan daerah-daerah Kabupaten yang lain.

Mungkin begitu Pak Ketua, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kepada Pak Menteri, ke depan kita harus bersinergi. Kurang lebihnya saya mohon maaf.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Ini, ini Maduranya halus sekali, Pak. Jadi ya mungkin, mungkin khilaf ini Pak ya. Karena ini masih masuk suasana lebaran dimaafkan Pak ya, maafkan. Untuk berikutnya sepertinya tidak dimaafkan Pak ya.

Ya, ini Pak Menteri mungkin kelupaan kali Pak Menteri ya, kelupaan mudah-mudahan di waktu yang akan datang seperti kita dengan Kementerian PU sama lah sebenarnya. Kita sudah bangun komitmen di sini kalau ada Presiden, ada kegiatan atau Pak Menteri ada kegiatan di daerah ya Anggota Komisi V diundanglah untuk bisa hadir di acara tersebut. Demikian Pak Menteri ya, saya rasa itu sudah konsensus bersama kita. Mungkin kelupaan kali Pak dari protokolnya.

Kemudian Pak Ishak, Ishak Mekki, bersiap-siap Pak Ali Mufthi.

F – P. DEMOKRAT (Ir. H. ISHAK MEKKI, M.M.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang, dan
Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati kepada Pimpinan Komisi V beserta Anggota, juga
Yang saya hormati Pak Menteri Perhubungan beserta jajaran,
Hadirin yang berbahagia.

Saya menoleh ke belakang sedikit, yang mana kita baru-baru ini melaksanakan lebaran dan angkutan lebaran luar biasa padat baik di pelabuhan maupun di jalan tol maupun di jalan arteri. Dan saya apresiasi Bapak Menteri Perhubungan dan jajarannya, selalu berada di tengah-tengah hiruk pikuk kemacetan, baik itu di jalan tol maupun di dermaga pelabuhan. Ini menunjukkan bahwa Bapak bertanggung jawab atas angkutan yang sedang dilaksanakan sekarang ini.

Dan, kami melihat angkutan penyebrangan Bapak Menteri, ya yang mana pelabuhan ini banyak kapal-kapal yang besar tapi tidak bisa mengangkut karena keterbatasan dermaga. Apakah tidak ada rencana untuk membangun dermaga-dermaga tambahan, mengingat informasinya dermaga 5 maupun dermaga 7 itu juga ada kendala, ada kerusakan, ada danaunya juga dangkal dan sebagainya. Karena ini juga merugikan masyarakat yang akan bepergian akibat dari keterlambatan, kemacetan ini, dan juga merugikan tentunya Pemerintah. Untuk itu harapan kita, bagaimana supaya cepat ditanggulangi karena kita akan melaksanakan lebaran-lebaran terus di setiap tahunnya dan juga hal-hal yang lain.

Kedua, di Sumatera Selatan ini penghasil batu bara terbesar, mungkin setelah Kalimantan mungkin, ya. Nah, angkutan jalan ini sangat mengganggu kenyamanan daripada masyarakat, karena banyaknya kecelakaan, debu, dan lain-lain sebagainya. Nah, harapan kita bagaimana KAI mengembangkan supaya memperpanjang kereta api ke tempat pertambangan ini, tempat

mengambilnya batu bara ini. Jadi memperpanjang rel agar kiranya dapat memperlancar dan memberikan kenyamanan terhadap lalu lintas. Karena ya, batu bara yang akan diangkut ini masih banyak luar biasa, untuk itu perlu segera sekarang ini untuk dipikirkan untuk dapat mengantisipasi, jangan sampai terus menerus menggunakan kendaraan mobil.

Ketiga, tadi dikatakan Tanjung Carat, pelabuhan di Sumatera Selatan, di Palembang, dibiayai oleh swasta murni. Nah, ini baru pertama mungkin di Indonesia dan kita sangat, BUMD. Oh, BUMD.

Nah, karena ini selalu ditunggu-tunggu masyarakat dan janji Pak Menteri mau perbaiki tapi ternyata tidak kunjung datang dan ini sudah lama betul di, dijanjikan Pemerintah namun tidak pernah terwujud. Harapan kita, ya bagaimana ini kalau ini memang dilaksanakan swasta maupun BUMD, ya Pak Menteri dapat *nge-push* nya dapat mengintervensinya supaya ini bisa terlaksana dengan cepat. Karena ini merupakan proyek strategis dan andalan daripada Sumatera Selatan, mengingat hasil bumi Sumatera Selatan sangat melimpah.

Ketiga, keempat, masalah terminal. Masalah terminal tipe A ini di, yang dimiliki oleh dulunya Pemerintah Daerah, nah sekarang diserahkan ke Pemerintah, Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Perhubungan, tapi sampai sekarang belum ada aktivitas sama sekali, belum ada perubahan sebelum dikembalikan ke Pemerintah. Jadi hampir sama dengan yang kemarin-kemarin lah. Harapan kita dengan ditangani oleh Pemerintah Pusat, Menteri Perhubungan ya terminal tipe A ini bisa berfungsi dengan baik.

Kelima masalah jalan tol Palembang – Kayuagung. Ini memang selalu kerusakan-kerusakan, *alhamdulillah* kemarin telah diperbaiki oleh Pak Menteri secara masif dan sudah baik. Namun kondisi jalannya ini sangat labil dan perlu diantisipasi tentunya tetap ada kerusakan-kerusakan. Nah, harapan kita ini karena gerbang Palembang dan jaraknya dari Kayuagung ke Palembang itu cuma 37 Kilo dan ini tidak ada lampu jalan. Mohon kiranya diberikan lampu jalan oleh Pak Menteri karena ini banyak sekali kecelakaan dan ini juga gerbangnya kota Palembang.

Ini saja yang mungkin dapat saya sampaikan dan lebih kurangnya saya mohon maaf.

*Wabillahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Baik. Makasih Pak Ishak Mekki.

Pak Ali Mufthi silakan, siap-siap Pak Jhonni Allen.

F – P. GOLKAR (DR. H. ALI MUFTHI, S.Ag., M.Si.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Yang saya hormati Ketua Komisi V,
Yang saya hormati Bapak Ibu Anggota Komisi V,
Pak Menteri beserta seluruh jajarannya.**

Terima kasih Pak Ketua atas waktunya. Pertama, ingin saya sampaikan bahwa, paparan Pak Menteri terhadap Pagu Indikatif Tahun 2023 itu kita percaya bahwa apa yang Bapak sampaikan itu adalah menjawab terhadap *problem* kerakyatan di Indonesia, saya yakin dan saya percaya itu sehingga kita mengharapkan bahwa perencanaannya nanti itu bisa menjawab terhadap dinamika masyarakat yang saat ini sangat membutuhkan.

Dinamikanya itu seperti apa, begini Pak Menteri, khususnya di Dapil saya ini dan ada beberapa lokasi yang itu memang membutuhkan solusi dari Pak Menteri karena kita sampaikan di bawah struktur Pak Menteri ini semua menjawab itu ada di Pak Menteri.

Ketepatan pada siang ini kita ketemu Bapak, ingin saya sampaikan bahwa, di Dapil saya itu ada rencana pembangunan di Kabupaten Pacitan pelabuhan, Pak. Ya itu tolong, karena itu apanya informasi yang masuk ke saya sudah pernah dijanjikan oleh Pemerintah Pusat tetapi ada dinamika apa sehingga pembangunan itu belum bisa diwujudkan sampai saat ini.

Yang kedua, Pak Menteri. Di Pantura, daerah Lamongan, di Kecamatan Brondong itu ada laut yang butuh pengerukan karena memang tingkat kedangkalannya sudah sangat parah. Itu sudah pernah saya sampaikan di Pak Direktorat di bawah struktur Bapak, tetapi yang bisa menjawab itu hanya Pak Menteri dan di kesempatan ini saya sampaikan, tolong Pak itu demi nelayan yang di sana agar itu dipikirkan, dialokasikan dan dianggarkan, sehingga Tahun 2023 itu bisa diwujudkan.

Berikutnya, Pak Menteri yang ketiga terkait dengan rakyat yang menempati tanah PJKA, ini yang selalu saya sampaikan. Saya tidak menginginkan Pemerintah mengambil dengan cara paksa. Kita menginginkan, saya menginginkan Pemerintah ngasih solusi sehingga Pemerintah tidak dirugikan, masyarakat ikut senang. Karena itu sepanjang jalan sudah dibangun secara permanen dan sebagainya, dan sebagainya, itu butuh ada kepastian hukum.

Mungkin Pak Menteri solusinya adalah ada kerjasama antara Pemerintah Pusat entah nanti siapa lembaganya dengan Pemerintah Daerah, sehingga Pemerintah Daerah dikasih kewenangan atau kepercayaan untuk mengelola daripada tanah-tanah yang saat ini ditempati oleh masyarakat, karena masyarakat juga butuh ketenangan, butuh kenyamanan, karena itu sudah dibangun dengan biaya yang tidak sedikit.

Berikutnya Pak Menteri terkait dengan aspirasi. Tolong Pak anggaran Bapak kan banyak walaupun katanya tadi turun gitu ya, tapi sudah 33 Triliun itu ya saya pikir sudah lumayan yaitu 2023 itu nanti kampanye pemilu itu sudah mulai di bulan November. Artinya apa desainnya sudah harus di Tahun 2000 sekarang ini desainnya. Kira-kira kontribusi atau *support* dari Kementerian ini terhadap kami di Komisi V ini apa selain kemarin katanya ada PJU, ada bus sekolah dan mungkin apalagi yang itu bisa mendorong komunikasi kita dengan Dapil.

Itu saya pikir Pak Menteri, kurang lebihnya mohon maaf.

Terima kasih, Pak Ketua. *Akhirulkalim*.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Ali Mufthi.

Pak Jhonni silakan.

F – P. DEMOKRAT (drh. JHONNI ALLEN MARBUN, M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang saya hormati rekan-rekan Kementerian Perhubungan dan seluruh jajarannya.

Pertama saya apresiasi Pak Menteri, saya cuman Pak, agak apa ini, ini agak sedikit Pak Menteri, laporan ada kemunduran, biasanya Kementerian Perhubungan ini paling detail paling lengkap ya, dari rencana kegiatan anggaran Kementerian Lembaga pada rencana kerja Pemerintah, kok ini mundur gitu loh, kok judulnya *highlight* padahal rencana kegiatan angkanya ini biasanya walaupun secara ini akan kita, sebenarnya di sini (**suara kurang jelas**) udah mulai angka-angka walaupun belum ya pendahuluan, ya toh.

Nah, oleh karena itu saya minta nanti ya khususnya, khususnya misalnya Pak Menteri PNPB, PNPB itu kan selalu saya minta 2-3 tahun terakhir gitu ya, supaya kita melihat apakah meningkat atau tetap, harusnya meningkat karena sudah lewat pandemi sehingga bisa kita lihat misalnya ya rencana kegiatan. Nah, oleh karena itu ya secara umum anggarannya pun meningkat kan gitu ya meningkat.

Sekali lagi yang bisa saya sampaikan kepada Kementerian bahwa, program-program sebelum tahun ini yang belum selesai katakanlah program-program *multiyears* atau yang belum selesai menjadi prioritas kepada Tahun 2023 kan begitu, harus begitu kan, apapun itu di mana pun itu, kan begitu, itu menjadi prioritas, jangan munculkan program yang baru, anggaran terbatas,

sementara program sebelumnya terbengkalai atau belum diteruskan. Ini, ini, ini juga tidak baik ya kan, tuntaskan gitu loh.

Nah, yang kedua tadi saya tidak mau mengulangi teman-teman hanya menegaskan bahwa ya toh memang terminal-terminal ini coba dievaluasi, memang terminal-terminal ini sudah banyak dibangun, tapi kurang difungsikan. Nah itu, itu, saya betul itu tidak itu tidak hanya di beberapa provinsi, tapi hampir, hampir semua provinsi. Saya kira itu perlu evaluasi apa penyebabnya dan apa yang harus dilakukan regulasi-regulasinya.

Saya kira itu yang poin penting dari saya, yaitu pertama saya minta ada rincian 2-3 tahun terakhir. Yang kedua, program-program yang belum selesai sebelum tahun ini harus dituntaskan pada tahun-tahun berikutnya. Saya kira itu aja poinnya.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Usulan nanti saya sampaikan aja nanti Pak, ada usulan dari daerah. Nanti aja lah.

KETUA RAPAT:

Pak Boyman Harun, bersiap-siap Pak Syahrul Aidi.

F – PAN (H. BOYMAN HARUN, S.H.):

Terima kasih, Ketua.

**Ketua dan seluruh Anggota Komisi V yang saya hormati,
Bapak Menteri dan beserta seluruh jajaran yang saya hormati,**

Saya sama tidak bertanya juga Pak, tetapi saya hanya ingin mengingatkan saja untuk 2023 agar Bapak jangan lupa di seluruh jajaran atas usulan-usulan kami, Pak. Karena ada usulan yang sudah kami usulkan dari sejak kami masuk jadi Anggota DPR ini belum terlaksana, belum terlaksana. Jadi jangan lupa karena tahun politik kita ini hanya 2023, 2024 sudah ga masuk itu.

Jadi saya hanya mengingatkan, semoga usulan-usulan kami yang kami usulkan lagi pada hari ini bisa terakomodir untuk 2023 seperti halte sungai Pak, kemudian berkaitan dengan masalah bandar udara yang ada di Kayong juga perlu kejelasan, Pak. Untuk itu saya juga akan mengusulkan lagi optimalisasi Pak, optimalisasi terminal penumpang yang ada di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang kemarin sudah kita bicarakan juga oleh Pak Wakil Bupati dengan Pak Novi pada waktu masih Dirjen udara Pak ya. Jadi harapan saya agar optimalisasi berkaitan dengan terminal ini segera bisa dilaksanakan di 2023. Karena menunggu Kayong saya pikir entah kapan Pak tidak tahu.

Jadi itu saja, Pak, yang ingin saya sampaikan. Saya izin dengan Ketua, kalau boleh saya boleh saya menyerahkan agar Pak Menteri jangan lupa 2023 itu, Pak. Jadi kalo ngomong gini mungkin lupa, tapi kalau diserahkan ini *Insyah* Allah mudah-mudahan Pak Menteri tidak lupa ya. Boleh ya Ketua ya.

KETUA RAPAT:

Mana ada yang tak boleh kalau Pak Boy. Silakan.

F – PAN (H. BOYMAN HARUN, S.H.):

Terima kasih, Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Boy.

Ini Ketua DPW PAN Kalimantan Barat ini, Pak. Silakan Pak Jhonni silakan, tolong difoto juga Pak Jhonni, jangan Pak Jhoni *ndak* difoto. Sana Pak Jhoni sebelah kiri, Pak. Baik.

Pak Syahrul Aidi, silakan.

F – PKS (H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, L.c., M.A.):

Makasih, Ketua.

**Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati,
Pak Menteri beserta jajaran.**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita sudah masuk lagi untuk membahas APBN 2023, sementara yang 2022 dan sebelumnya banyak yang tidak masuk.

Pak Menteri, kemarin saya sudah berkoar-koar beberapa kegiatan masuk di tahun ini, tetapi ternyata belum konkrit, tapi ada peluang informasinya bocorannya. Ini ada titik nanti akan saya sampaikan ke beberapa kegiatan itu sudah saya kampanyekan, saya jadi malu jadinya di tengah-tengah masyarakat.

Kemudian saya ingin menyampaikan, saya pernah diundang oleh Kepala navigasi kelas 1 Dumai tentang peluang PNBPN di Selat Malaka. Nah ada kegiatan ketika itu yaitu namanya RUTAP (Rencana Umum Tata Alur Pelayaran) di Selat Malaka. Saya lihat sudah rampung, mudah-mudahan ini bisa kita tindaklanjuti agar memang betul potensi PNBPN di sana itu bisa tergali. Karena informasi yang saya dapatkan 60% Selat Malaka itu ada di Indonesia, 40% itu ada di wilayah Malaysia dan Singapura, tetapi anehnya kapal yang melewati Selat Malaka itu hanya 10% yang melewati alurnya Indonesia. Nah, mudah-mudahan dengan selesainya RUTAP, kemudian bisa kita optimalkan,

kita persiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Kapal-kapal yang melewati Selat Malaka bisa melewati alurnya yang ada di Indonesia, tentu butuh sarana dan prasarana. *Insyallah* target dari Pak Menteri untuk PNPB di melalui Kementerian Perhubungan bisa terwujud.

Yang kedua Pak Menteri, saya bertemu dengan Bupati Tembilahan. Nah, kabupaten yang paling jauh sekarang itu dari Pekanbaru, Ibukota Provinsi Riau itu adalah Kabupaten Indragiri Hilir dan di situ kita tahu di situ merupakan Kabupaten Indragiri Hilir ini adalah pusat kelapa Indonesia, bahkan kelapa dunia, banyak investasi di sana. Nah, hanya saja kalau dari, biasanya datangnya dari Singapore ke Batam, Batamnya kalau ke Pekanbaru dari Pekanbaru itu masih 8 jam ke Tembilahan.

Nah, ada bandara di sana namanya Bandara Tempuling. Sekarang ini tentu sudah dalam kewenangan Kementerian Perhubungan, minta diaktifkan kembali Pak Menteri dan perlu nampaknya trayek untuk perintis, ya. Mudah-mudahan ini bisa memudahkan, baik bagi investor, bagi pengusaha, peningkatan investasi di Tembilahan, khususnya bisa naik kembali.

Kemudian yang ketiga, yang terakhir, saya ingin menanyakan terkait SDM yang ada di Kementerian Perhubungan, khususnya bagi tenaga honorer. Saya tahu bahwasannya di tenaga lapangan, di Kementerian ini banyak sekali tenaga honorer. Kami bisa diberikan gambaran terkait dengan aturan yang terbaru keluar dari Menpan RB bahwasannya 2023 tidak lagi boleh ada honorer, padahal kita tahu bahwasannya untuk tenaga lapangan kalau tidak dengan menggunakan tenaga honorer saya pastikan tidak akan bisa berjalan Kementerian ini pada apa namanya di lapangan nanti.

Nah, mudah-mudahan kami bisa mendapatkan skenario apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan terkait aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Menpan RB.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Izin, Ketua saya ingin menyerahkan.

KETUA RAPAT:

Silakan, silakan, silakan.

Selanjutnya Pak Ruslan silakan, bersiap-siap Pak Eddy Santana.

F – PKB (RUSLAN M. DAUD):

Bismillah.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

Yang saya hormati Ketua dan seluruh para Anggota,

Yang saya hormati Bapak Menteri seluruh jajaran yang hadir.

Tentunya, yang pertama kami mengapresiasi dan terima kasih, Pak Menteri. Kami cuma mengingatkan kembali Pak Menteri, 33 Triliun untuk anggaran untuk Bapak Menteri tahun ini, Tahun 2023 mohon diperhatikan itu adalah untuk provinsi Aceh Pak Menteri dalam segala aspek Pak Menteri, sesuai dengan tupoksi Pak Menteri, baik di segi kereta api Pak Menteri perlu dilanjutkan kembali.

Kemarin yang saya tahu sudah sedikit, tetapi belum maksimal Pak Menteri, itu adalah masih sangat jauh apalagi kemarin hasil kunjungan Komisi ini Komisi V yang dipimpin langsung oleh Bapak Eddy Santana pada saat itu, ada satu jalur Bireuen ke Lhokseumawe ataupun ke Paloh itu adalah sudah mangkrak sudah beberapa tahun yang lalu. Sebab kalau memang di sini pembebasan tanah itu sudah hampir 100% itu Pak Menteri, tinggal untuk melanjutkan fisiknya saja. Kalau memang Bireuen bisa tersambung dengan Lhokseumawe ataupun dengan Kuta Blang itu baru bisa memacu perekonomian masyarakat di tiga Kabupaten.

Nah, yang kedua juga Pak Menteri, hasil kunjungan juga Komisi mengenai Bandara Malikussaleh ataupun Lhokseumawe, Aceh Utara. Itu juga perlu ditindaklanjuti, itu juga hasil daripada kunjungan Komisi kemarin. Dan lain-lain Pak Menteri seperti dermaga baik di Sinabang ataupun di Ulee Lheue itu perlu diprioritaskan untuk tahun depan.

Dan mungkin yang terakhir, Pak Menteri. Ini lagi viral di Aceh ini Pak Menteri, mengenai seolah-olah adalah izin untuk penerbangan ke luar negeri dari Aceh baik ke Kuala Lumpur dan juga lain-lain itu seolah-olah Pak Menteri yang menghambat. Nah, itu perlu dipenjasakan Pak Menteri, sebab kita tahu status Aceh saat ini sudah di level 1, sesuai juga dengan provinsi yang lain, kabupaten yang lainnya di Indonesia.

Maka sudah selayaknya dan sudah wajarnya Bandara Internasional di Provinsi Aceh itu sudah bisa dibuka dan juga tolong Bapak Menteri dikoordinasikan dengan Satgas Covid-19 saya pikir itu Aceh sudah level 1 itu sudah layak dan sangat pantas dibuka kembali seperti sebelum pandemi.

Maka, oleh karena itu harapan kami dan juga harapan masyarakat Aceh Bapak Menteri, tolong dipercepat, koordinasikan dengan satgas Covid-19 supaya Bandara Internasional yang ada di Provinsi Aceh segera dapat dibuka kembali seperti sediakala, itu harapan semua masyarakat Aceh, Pak Menteri.

Dan, juga tolong juga Pak Menteri didorong, dan juga diberitahukan kepada maskapai itu sudah bisa yang secara nasional itu sudah bisa untuk mendarat kembali di Provinsi Aceh. Saya pikir itu Pak Menteri saja yang perlu, sebab ini ada *miss* komunikasi ini apa Pak Ketua, seolah-oleh Pak Menteri tidak mengizinkan, padahal itu status dulu adalah status yaitu Covid itu kita sama-sama kita tau.

Nah, saat ini Covid sudah di level 1 di Provinsi Aceh. Jadi sudah sewajarnya Bapak Menteri berkoordinasi dengan satgas dan juga sudah bisa untuk membuka kembali yaitu penerbangan untuk keluar negeri dari Provinsi Aceh.

Sekian terima kasih.

*Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Ruslan Daud.

Silakan, Pak Eddy Santana.

F – P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):

Makasih, Pak Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Ketua Komisi V beserta Anggota yang saya hormati,
Pak Menteri Perhubungan beserta seluruh jajaran yang sangat saya hormati.**

Pertama, yang pertama adalah tadi saya memperkuat gitu apa itu yang disampaikan Pak Ruslan. Kebetulan saya memimpin ini bukan ditunjuk dari awal Pak, pengganti karena ada berhalangan Pak Bakrie waktu itu ya. Sebelumnya Pimpinan kita yang lama dari PPP juga karena ada musibah, sampe Medan balik lagi, terus saya yang melanjutkan Pak Bakrie, Pak Ruslan. Pak Bakrie juga ada, apa ada pertemuan partai jadi saya.

Tapi itu yang disampaikan, pertama itu di Malikussaleh perlu penyempurnaan bandara itu sudah, sudah ada cukup, hanya mungkin perpanjang *runway* nya, beberapa catatanlah waktu itu kita di Komisi V sendiri tercatat itu.

Nah, kemudian masalah rel kereta api yang, yang katakanlah tidak dilanjutkan untuk itu, kalau kasarnya mangkrak, Pak. Nah itu mohon juga percepatan kembali, dibangun kembali. Sebenarnya tidak panjang hanya berapa kilometer dan juga pengadaan lokomotifnya ya dan gerbong penumpangnya, sehingga apa yang dibangun di situ bisa dipakai, dipergunakan sebaik-baiknya supaya tidak mubazir. Makasih Pak Ruslan mengingatkan juga.

Kemudian Pak, di Dapil saya, nah ini saya harus ya dengan rakyat Sumatera Selatan memberikan apresiasi Pak di Tanjung Carat ini, tadi disebutkan Pak Ishak Mekki juga kami satu Dapil. Nah, hanya memang mundur terus Pak, mundur ini ya mungkin Pak Menteri yang paling tau. Dijanjikan waktu

itu bulan Oktober tahun lalu Pak, *groundbreak* nya, tapi sampai sekarang kita menunggu-nunggu juga dan saya minta juga mohon informasinya gitu ya, kalau mau mulai juga saya ini, Pak Ishak Mekki juga diundang, kita sama-sama ke sana gitu Tanjung Carat dan saya juga akan mempersiapkan diri juga waktunya untuk kalau ada acara di sana.

Nah kemudian Pak, di Perhubungan Udara nah ini juga Bandara Silampari, Pak. Jadi betapa pentingnya Bandara Silampari itu untuk Sumatera Selatan karena jauh sekali jangkauannya dari Palembang 8 sampai 9 jam. Kemudian Lubuk Linggau itu strategis, Pak. Dalam rangka persiapan, persiapan mereka ini *Insy* Allah menjadi provinsi baru, ke depannya Sumatera Selatan Barat gitu ya, dan ini sudah di, sudah bukan wacana lagi, sudah ada prosesnya.

Nah, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas nama rakyat Dapil saya juga masyarakat sudah beroperasi kembali, batik kita mulai. Saya sudah diajak Pak Menteri, terima kasih Pak kita sama-sama ke sana dan Walikotanya juga mereka senang sekali dan itu mudah-mudahan jadi amal ibadah Bapak, sekarang dipake terus itu rame orang naik haji atau juga umroh sebelumnya, ramai sekali. Jadi yang dikhawatirkan saat dulu kosong karena dua tahun tidak jalan akibat Covid ini ternyata ramai, Pak. Dulu pernah dua kali sehari, Lubuk Linggau ke Jakarta, PP gitu.

Nah, kemudian yang menjadi masalah adalah bandara Atung Bungsu, Pak. Nah, ini belum beroperasi. Ada baiknya kita evaluasi juga mungkin ke depan bisa dijadikan tempat pelatihan penerbangan Pak, atau Poltek di situ karena udaranya bagus, kalau buat asrama atau apa nggak perlu AC itu di pegunungan itu, sehingga itu saya kira cocok daripada tidak ada yang berjalan di situ. Bisa juga untuk pariwisata, tapi juga untuk Poltek Penerbangan di situ. Saya kira ini usulan kami.

Nah, untuk Perhubungan Darat, mungkin juga terima kasih sudah dibangunnya dermaga 16 hilir juga 10 hulu, hanya tahun-tahun ke depan ini 2023 mohon ini ditambahkan Pak, karena kita itu masih pendek sekali kalau menyebut dermaga itu. Dermaga di Palembang itu yang di 16 hilir dan 10 hulu juga berfungsi sebagai *retaining wall* dari Sungai Musi itu, juga sebetulnya PU juga bisa tapi sekarang lebih cepat perhubungan, Pak. Kalau perhubungan nyebutnya dermaga Pak, kalau PUPR *retaining wall* mungkin. Ya terima kasih Pak Menteri, yang bergerak cepat malah Perhubungan gitu untuk membangun itu 16 hilir dan 10 hulu.

Nah, yang terakhir Pak juga apresiasi, ini juga ada terobosan baru dari Pak Menteri tapi saya juga gak diajak Pak waktu itu. Jadi LRT itu difungsikan gitu ya sekarang ini ada terobosan untuk siswa kalau *ndak* salah hanya 25.000 per bulan, per bulan 25.000 ini menarik. Saya mengusulkan justru bukan hanya siswa Pak, mungkin ASN, pegawai swasta, tidak 25 Ribu mungkin 50 Ribu, sehingga penuh dulu kita, LRT itu berfungsi dengan baik optimal, baru ke depan kita pikirkan ke depannya bagaimana untuk supaya LRT itu menguntungkan gitu kan, tidak rugi ya lumayanlah lah karena investasi kita sudah sangat besar di situ.

Saya menyambut baik ini dan terima kasih Pak Menteri, apresiasi ke semua dari Palembang dan Sumatera Selatan. Terima kasih Pak hanya itu, dan Pak Ishak ya.

Makasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

F – P. GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Selanjutnya kami persilakan ke Kakak Wandik.

F – P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):

Maaf Pak, saya mau menyerahkan juga Pak.

F – P. GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Boleh, boleh Pak silakan.

Kakak sabar ya Kakak.

F – P. GERINDRA (IIS ROSYITA DEWI, S.Hum., M.M.):

Pimpinan izin, Pimpinan.

Kalau saya boleh didahulukan karena mau Rapat Fraksi.

F – P. GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Kakak Willem bersedia gak kalau saya alihkan ke Ibu dulu ya. Ya makasih Kakak Willem. Silakan, Bu.

F – P. GERINDRA (IIS ROSYITA DEWI, S.Hum., M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang saya hormati, saya banggakan Ketua dan Pimpinan Komisi V, Beserta seluruh rekan-rekan Anggota Komisi V, Yang saya hormati juga Pak Menteri beserta seluruh jajaran, yang saya tidak sebut satu-satu.

Tidak banyak, hampir sama dengan teman-teman yang lain yang akan saya sampaikan.

Yang pertama, terkait kinerja Kementerian Perhubungan. Di semester awal saya rasa terus bisa dipacu karena prosentasinya belum maksimal, sedangkan pandemi sudah mulai melandai.

Yang kedua, saya membaca di *media online* tentang adanya perubahan pemanfaatan dari Stasiun Gambir ke Stasiun Manggarai. Nah, apakah ini sudah ada kajian studi kelayakan yang betul-betul baik atau sempurna, mohon ini dijelaskan.

Selanjutnya untuk program di sekolah, saya rasa sama dengan teman-teman yang lain, karena di Kementerian Perhubungan ini program saya rasa hanya satu ya dan itu bus sekolah yang bisa kita bawa ke Dapil, tetapi sudah satu tidak ada lagi program-program yang bisa kita bawa. Nah, pada kesempatan ini saya meminta ke Kementerian, mungkin teman-teman juga setuju agar supaya bisa ditambah seperti itu, karena anggaran pun sudah saya rasa harusnya sudah bisa dikembalikan seperti semula. Jadi kalau bisa 5 begitu ya setuju gak temen-temen. 10 kata Bu Novi 10 Ketua, Pimpinan, mohon izin.

Iya, karena Dapil saya itu 5 Pak, kalau satu itu apa mungkin ya dibelah-belah begitu busnya. Jadi ini memang kebutuhan juga di terutama di pesantren yang saya apa namanya salurkan ke pesantren-pesantren itu sangat bermanfaat untuk anak-anak yang sekolahnya, rumahnya di luar kota atau jauh dari pesantren. Kemarin saya sudah menyerahkan itu, ada Pimpinan pesantren itu sampai menangis mendapatkan ini karena saking terharu dan membutuhkan. Saya rasa untuk, untuk apa bus sekolah sama dengan teman-teman kalau bisa ditambah seperti itu.

Selanjutnya, ini yang terakhir kalau bisa ada program-program padat karya. Pak Menteri, yang ini saya rasa bisa juga membantu masyarakat untuk mengembalikan perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi tahun-tahun lalu. Karena mengingat ini pandemi kan sudah hampir tidak ada kasus ini sekarang ini. Jadi sudah-sudah seharusnya apa namanya anggaran kembali begitu. Saya rasa demikian yang saya sampaikan.

Terima kasih, Pimpinan, Pak Menteri.

*Wabillahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Izin Pimpinan saya mau langsung ke Fraksi ada rapat kalau boleh.

F – P. GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Salam sama Pimpinan Fraksinya, Bu.

F – P. GERINDRA (IIS ROSYITA DEWI, S.Hum., M.M.):

Siap.

F – P. GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Itu Ketua Fraksinya ada di sini, gimana itu.

F – P. GERINDRA (IIS ROSYITA DEWI, S.Hum., M.M.):

Mana gak ada itu.

F – P. GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Ada Pak.

F – P. GERINDRA (IIS ROSYITA DEWI, S.Hum., M.M.):

Ya saya ngikut aja nanti.

F – P. GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Oh iya, iya, iya.

F – P. GERINDRA (IIS ROSYITA DEWI, S.Hum., M.M.):

Terima kasih.

F – P. GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Selanjutnya Pak Willem, silakan Kakak.

F – P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):

Baik.

Pak Ketua, rekan-rekan Anggota Komisi V, dan juga Pak Menteri Perhubungan, Pak Sekjen dan juga para Dirjen, serta Seluruh jajaran yang kami hormati.

Dari saya ingin memberikan apresiasi kepada Pak Menteri serta seluruh jajarannya karena setelah ngikuti materi yang telah disajikan tadi, saya melihat bahwa penyelenggaraan pengembangan infrastruktur itu tidak hanya di titik beratkan pada kawasan-kawasan sentra produktif atau kawasan-kawasan sentra industri tapi juga tidak abai terhadap pemerataan pembangunan nasional dengan menyentuh daerah-daerah terpencil, terluar, terdepan dengan

membuka keterisolasian daerah dan juga pemberian subsidi, PSO, dan juga angkutan perintis, tol laut, tol udara, dan juga jembatan udara.

Kami melihat ini benar-benar menterjeba, menterjemahkan apa yang menjadi semangat daripada Bapak Presiden kita, Bapak Presiden RI ke-tujuh, Bapak Ir. H. Joko Widodo.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa memang penting untuk memperhatikan kawasan-kawasan ini baik kami di timur baik kita Papua dan tentunya Ambon maupun Sulawesi Tengah, seperti yang di Tana Toraja dan juga Mentawai dan Nias, tentunya menjadi perhatian.

Dan, juga pada kesempatan ini sampaikan kepada Pak Menteri bahwa hasil kunjungan Komisi itu di Sumatera Barat, di sana kami telah mendengar aspirasi dari Gubernur Sumatera Barat, di sana butuh perhatian dukungan dari Kementerian Perhubungan untuk penyediaan sarana prasarana di bandara dan juga di stasiun kereta api di dekat bandara. Dan, juga untuk Mentawai, terima kasih sudah usulkan untuk bandara, pembangunan bandara di sana dan kami juga harapkan perhatikan juga untuk pembangunan pelabuhan di Mentawai dan juga Nias.

Berikut terkait dengan sumber pendanaan dari PHLN. Pak Menteri, mengapa Kementerian Perhubungan sumber dana yang lebih banyak kontribusinya dari Japan International Cooperation Agency, presentasinya hampir 61%. Apabila dibandingkan dari sumber dana lainnya atau ADB, Jerman, Bank Dunia, apakah karena faktor tingkat bunga pinjaman dari JICA ini lebih rendah atautkah ada kebijakan lainnya. Pak Ketua, mungkin sedikit yang bisa dapat kami sampaikan pada kesempatan ini.

Sekian, terima kasih.

F – P. GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Makasih, Kakak Willem.

Selanjutnya kami persilakan ke Ibu Neng Eem Marhamah, siap-siap Ibu Novita Wijayanti.

F – PKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ., M.M.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Menteri beserta jajaran yang saya hormati dan saya banggakan, Pak Ketua Pimpinan dan semua Anggota Komisi V DPR RI yang saya hormati dan saya banggakan.

Pertama sebenarnya apa yang beberapa yang disampaikan oleh teman-teman itu harus benar-bener dikerucutkan, terutama yang disampaikan Pak Sudjadi terkait keselamatan dan lain sebagainya termasuk juga Pak Sud, eh

Pak Sudewo ya terkait keselamatan, terus Pak Sudjadi bilang karena memang di sini ada banyak pejabat yang diganti otomatis banyak pejabat baru, maka saya kira untuk Tahun 2023 karena itu tahun politik juga menghadap pemilu maka juga harus ada program baru.

Tentu iya programnya juga harus ada program yang baru ya betul. Nah, tentu program tersebut bagaimana itu bisa disinergikan dengan masyarakat di Dapil-Dapil kita, bisa dibawa ke Dapil, bisa di-*share* untuk masyarakat. Tidak masalah nilainya kecil-kecil, tetapi harus banyak dalam sisi jumlah. Jadi bisa saja dengan sosialisasi keselamatan lalu lintas darat, sosialisasi keselamatan apa transportasi udara, laut, dan lain sebagainya. Dengan mengumpulkan orang-orang masyarakat seperti itu tidak masalah, itu saya kira bagus ya apalagi nanti di Tahun 2023 karena itu akan menjembatani kami untuk kemudian harmonis dengan konstituen, akan menjembatani kami kemudian bisa menyapa masyarakat di Dapil kita sehingga eksistensi dari Kementerian Perhubungan beserta jajarannya secara institusional itu juga bisa dirasakan lebih banyak lagi.

Karena kalau kita bicara program yang lebih besar gitu kan, ya saya kira ya mungkin tidak semua mereka merasa itu bahwa kewajiban Pemerintah, tetapi kalau ada yang langsung seperti itu saya kira mereka biasanya lebih, lebih senang Pak, lebih nyaman. Saya kira apa tidak ada salahnya kalau kemudian kita memberikan agar mereka tersenyum bahagia apalagi selama dua tahun ke belakang kita harus menahan diri untuk tidak pergi kemana-mana, untuk tidak melakukan apa-apa, terus banyak aturan dan lain sebagainya. Saatnya saya kira di Tahun 2023 nanti program-program yang diluncurkan itu harus bisa menyentuh masyarakat.

Terkait bis itu saya sepakat untuk diperbanyak dan harus ada program-program baru yang saya kira itu tidak, tidak susah Pak ya, program-program untuk bikin program seperti itu bisa dari semua Dirjen yang ada. Nah saya berharap, Pak Menteri untuk apa mengarahkan para Dirjennya untuk bagaimana ada program itu. Saya kira itu.

Terus kemudian yang kedua terkait jalur lintas selatan Jawa Barat, dari mulai Banten, ya, Sukabumi, Cianjur, terus kemudian Garut, Tasik sampai ke Jawa Tengah, terus ada juga dari Banten, Sukabumi, Cianjur yang ke Bandung itu kan masih gelap Pak, mohon mungkin itu bisa di, di, dibantu terkait apa fasilitas-fasilitas penunjang untuk keselamatannya itu. Karena kayaknya beberapa kemudian kita sudah mengajukan beberapa kali ternyata kan belum, belum diakomodir juga gitu kan, apalagi tahun ini kan setiap Kementerian ada pemotongan ya dua termin seperti itu dan itu ternyata lewat lagi lewat lagi.

Saya berharap apa ini bi, kalau nggak bisa tahun ini, di Tahun 2023 itu harus di apa diwujudkan karena gelap Pak, takut saya kalau lewat sana itu gitukan, banyak juga kejahatan dan lain sebagainya. Jadi itu pun saya kira apa ya keselamatan kan seperti Pak Sudewo katakan bahwa *output* utama kita adalah keselamatan. Mungkin itu saja.

Terima kasih.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**F – P. GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si.) – WAKIL
KETUA KOMISI V DPR RI:**

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Selanjutnya Ibu Novita Wijayanti, siap-siap Ibu Athari Gauthi.

F – P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Terima kasih. Terima kasih,

**Pimpinan yang saya hormati dan Anggota,
Yang saya hormati juga Pak Menteri dan jajaran semuanya baik yang fisik
maupun virtual.**

Pak Menteri, sebelumnya saya ucapkan selamat honoris causa nya, saya kemarin sudah WA, karena sudah ketemu ini langsung. Kemudian selamat juga Pak Novi menjadi Sekjen dan semuanya yang menjadi Plt., Pak Mugen yang mana ya Pak ya. Laut? Oh Pak Arif Toha ya, Pak Arif Toha. Sekarang laut Pak Arif Toha, tetapi kalau darat sekarang siapa Pak Menteri? Pak Cucu ya, Pak Budinya ke mana ya Pak ya? Jadi tenaga itu ya Pak ya, saya pikir itu tadi yang samping Pak Budi kok bukan. Iya, pake masker badannya kayak Pak Budi gitu saya tanya sama Pak Zul.

Kemudian saya langsung saja, Pak Menteri. Saya terima kasih kemarin di Cilacap sebetulnya seperti bandara sudah difasilitasi oleh Pak Novi dan Pak Menteri langsung, tapi mungkin Pemdanya juga belum begitu proaktif saya nggak ngerti, mungkin karena mau habis masanya ya jadi kadang-kadang suka begitu, tapi saya ucapkan terima kasih karena sudah men-*support* Kabupaten Cilacap yang Dapil saya, Dapil saya Cilacap dan Banyumas.

Kemudian satu-satu aja ke Dirjen laut, Pak Arif Toha. Seperti yang saya sampaikan yang dulu, saya langsung aja Pak Menteri untuk Dapil saya. Saya membutuhkan ada pengerukan Pak sebetulnya, karena di Cilacap membutuhkan sandaran kapal yang lebih maksimal. Itu mungkin bisa disurvei, kalau memang memungkinkan saya harap itu bisa dilaksanakan. Kemudian kereta api, ya kalau laut Pak Arif Toha nanti saya komunikasi langsung aja ya Pak ya. Kalau ada ini jadi saya singkat-singkat saja.

Kemudian kereta api, padat karya dan perlintasan sebidangnya Pak, karena kemarin beberapa banyak kecelakaan diharapkan lebih maksimal penjagaannya dan kemudian jalan-jalan yang rusak yang pelebaran sebidang juga bisa dikoordinasikan. Sama Pak Zul juga komunikasi sudah baik, jadi relatif dengan Dirjen dan jajaran sampai bawah kita komunikasinya sudah baik Pak Menteri, dan padat karyanya juga banyak dilakukan di Cilacap dan

Banyumas, tapi seperti tadi yang disampaikan oleh teman-temannya bahwa nanti 2023 kita pasti membutuhkan banyak kegiatan di lapangan.

Kemudian, udara Pak Novi karena masih Plt sekalian ya Pak ya, oh Plt nya udara ini siapa. Pak oh iya iya, saya pikir Pak Novi, nanti saya minta nomor telponnya untuk bisa langsung komunikasi, karena rapatnya kan jarang-jarang jadi sewaktu-waktu.

Jadi, kemarin saya sempat pernah terbang Pak, ke mana ya, Provinsi mana kunjungan, itu sudah seperempat, seperempat jalan 15 menit pesawat, kebetulan saya gak dapat Garuda jadi saya ngejar dengan Citilink, Kaltim ya? Oh iya ke Kaltim saya kehabisan apa *seat* saya nyusul pake Citilink, saya sudah di tengah lautan 15 menit itu gak jadi melanjutkan karena katanya berasap atau gimana kemudian balik ke Jakarta. Nah, itu kan mengerikan sekali, mana saya gak bisa berenang lagi kan. Jadi itu saya aja takut gimana orang lain.

Jadi harapannya, tolong lah pesawat-pesawat itu lebih bagaimana dicek kesiapannya, kalau memang tidak layak ya jangan kemudian dibiarkan untuk bisa terbang gituloh Pak, karena ini nyawa. Sudah di tengah lautan saya bingung itu, kalau kereta masih mikir loncat ada daratan gitu kan, ini loncat lautan semua gak ada daratan ya udah itu. Jadi saya waktu itu mau WA Pak Novi juga sama Pak Menteri kelewatan lah, mumpung hari ini saya berharap sekali Pak itu serius sekali untuk pesawat. Mungkin pada saat Covid dua tahun itu lama tidak digunakan, sehingga pada saat digunakan gak tahu kayak mobil Mercy atau mobil apa kan kadang-kadang nggak dipakai, pas dipake ada aja gitu, tapi kan ini di pesawat mengerikan, jadi penting ya Pak ya.

Dan tiketnya juga, tiketnya juga diperhatikan Pak karena kadang-kadang kita aja ngelihatnya "Ya Allah kok mahal bener gitu." Apalagi masyarakat di bawah, jadi mereka yang tidak ada pilihan jadi bingung ini karena tarif tiketnya kadang-kadang sewaktu-waktu itu menggila Pak Menteri dan Pak Dirjen dan Pak Sekjen.

Kemudian untuk darat ini Pak Cucu. Pak Cucu kan sudah dari dulu di apa Dirjen Darat, untuk bus pasti bus saya dapat infonya katanya tahun besok nggak ada, tapi berdoa tetap ada karena itu sangat membantu di bawah Ponpes, sekolahan dan yayasan-yayasan.

Kemudian usulan saya yang tahun ini juga belum turun-turun seperti penerangan jalan, Pak Menteri. Karena banyak sekali daerah yang gelap, berharap ini Kepala Desa kadang Bupati itu mintanya ke kita, apa, penerangan jalannya. Pak Cucu, ini sudah Juni dari bulan awal katanya akan dibahas tapi belum turun-turun sama sekali.

Kemudian *guardrail* Pak, banyak daerah yang butuh pembatas itu kecelakaan, apalagi sekarang dari kemarin itu banyak kecelakaan bahkan gak usah cerita di Provinsi Kalimantan, Balikpapan yang truk-truk ODOL melebihi muatan kemudian rem blong atau bus yang supirnya ngantuk bawa anak sekolah sehingga kecelakaan meninggal 30 sekian gitu kan, Pak Menteri.

Bahkan di tempat, tempat saya aja kemarin ada bus yang remnya blong itu, itu nabrak juga.

Jadi yang pertama saya minta tolong untuk kendaraan itu cek rem, kemudian kelayakannya Pak ini serius jadi jangan cuman apa namanya retorika Pak Menteri, saya minta tolong sekali bagaimana ini bisa dikoordinasikan dengan Dishub yang ada di provinsi maupun di kabupaten bahwa kendaraan-kendaraan umum ini membawa penumpang dan bisa membahayakan penumpang dan bahkan pengendara lainnya, serta pejalan yang ada menggunakan jalan. Itu Pak Cucu, penting sekali Pak ini. Saya minta dengan sangat serius tidak hanya ngomong di rapat kemudian iya-iya, tapi tidak dilaksanakan sehingga banyak sekali kecelakaan truk, bus, dan semuanya. Di luar itu tadi usulan aspirasi, penerangan jalan, *guardrail*, dan lain-lainnya, apalagi ke depan banyak usulan dari masyarakat.

Kemudian pelabuhan tadi laut yang Kabupaten Cilacap dan pastinya Pak Menteri saya *support* untuk daerahnya Pak Menteri di Palembang itu Tanjung Carat karena perjuangannya kita sama-sama dari awal, berharap Tanjung Carat bisa cepat tidak hanya *groundbreaking*, kalau *groundbreaking* abis itu ditinggal kan percuma kemudian ditinggalkan, tapi ingin sekali itu bisa dilaksanakan, sehingga tidak di kota ya Pak Eddy dan Pak Ishak Mekki, karena keluarga saya juga banyak di Palembang dan Lampung gitu.

Jadi kecelakaan itu ternyata tidak hanya di Balikpapan yang di jalan umum, tetapi di situ juga katanya karena pelabuhannya di kota banyak sekali kecelakaan yang nabrak-nabrak tapi tidak ter-*expose* itu aja.

Kemudian pertanyaan yang terakhir tentang Stasiun Gambir, tadi sudah ditanyakan karena saya juga sering pulang ke Purwokerto menggunakan stasiun ini juga ingin penjelasan Pak Zul.

Terima kasih, Pimpinan dan Pak Menteri semua jajaran.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

F – P. GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Walaikumsalam,

Ibu Athari, itu Pak Fadullah, Pak Fadholi mau ke rapat fraksi, kalau berkenan kami persilakan beliau dulu. Ya, silakan Pak Fadholi.

F – P. NASDEM (Drs. FADHOLI, M.Ikom.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Bapak, Ibu Pimpinan Komisi V, dan
Bapak Menteri yang saya hormati.**

Pertama saya menyampaikan apresiasi atas kinerja dan termasuk penanganan masalah lebaran yang sangat bagus dan sangat sukses, mudah-mudahan *barakah Amin Allahumma Amin*.

Yang kedua, ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, ya kaitannya dengan mahalnya ongkos-ongkos untuk transportasi, ini mengganggu pada harga, ini korelasinya sangat ini. Nah, bagaimana untuk bisa mengatur itu, karena ini juga ada kenaikannya pada inflasi, termasuk di Jawa Tengah ini karena kenaikan ongkos-ongkos, termasuk juga tiket pesawat ini sekarang kan menjadi mahal ini, ini bagaimana cara mengaturnya agar tiket pesawat ini bisa lebih terjangkau dan bisa normal kembali penerbangan itu, kan Covid juga sudah selesai. Ini perlu menjadi *stressing* saya pikir itu.

Karena wisman-wisman ini juga menurun dengan apa namanya *cost* di pesawat udara dan juga apa namanya protokol yang ini mesti harus disederhanakan *Insyallah* covid sudah selesai.

Kemudian yang kedua kami selaku Anggota Komisi V menyetujui pada apa namanya pagu indikatif 2023 yang sebesar 33 koma sekian triliun ini. Nah tentu dalam hal ini mengalokasikannya ini kalau memang memungkinkan ini masih ada kemungkinan untuk bisa dinaikkan, tentu tadi sudah di awal disampaikan, tentu akan ada koordinasi dan perjuangan para Pimpinan dan yang ada di Banggar.

Nah, persoalannya adalah pembagian alokasi di apa Kementerian Perhubungan ini di beberapa Dirjen ini apakah ini sudah baku, apakah kemungkinan nanti masih ada yang pada sisi lain naik pada sisi lain turun. Seperti misalkan per apa Inspektorat Jenderal ini kan hanya sekian, ini kira-kira cukup gak ini untuk bisa mengikuti kegiatan ini, padahal kegiatannya cukup besar itu dan wilayahnya cukup bagus. Nah, ini perlu dibahas terlebih dahulu. Nah ini kemungkinan kalau misalkan Inspektorat Jenderal ini dimungkinkan itu masih kurang gitu ya, pada pos mana yang memungkinkan nanti akan bisa dikurangi, ini menjadi bagian yang sangat penting dan seterusnya.

Termasuk juga di sini ada, saya melihat ini adalah badan kebijakan transportasi ini hanya 160 ini. Ini kira-kira cukup gak dengan anggaran yang semacam ini. Kalau ini nanti dimungkinkan memang tidak cukup, nah perlu ada *grand design* daripada program ini yang nantinya akan dibawa di RKA K/L pada bersama-sama dengan para Dirjen, ini perlu ada rambu-rambu.

Nah, berikutnya adalah dari sekian usulan yang disampaikan oleh para Anggota ini akan dialokasikan dari mana, sementara Bapak sudah membuat draf di sini, ini sudah ada lokasi 1, 2, 3 dan sebagainya, bagaimana nanti kita cara agar mengaturnya ini juga perlu, sehingga jangan sampai Bapak memberikan ruang untuk bisa memberikan banyak usulan dari daerah, tetapi kemudian ini tidak akan terakomodir, maka ini tidak, ini akan lucu disampaikan di dalam rapat yang semacam ini tetapi kemudian tidak ada realisasi, karena tidak ada *space* atau tidak ada cadangan Bapak untuk bisa merealisasi daripada usulan-usulan tersebut, sementara Bapak sudah membuat rancangan yang sedemikian rupa.

Nah, terus bagaimana cara mengalokasikan ini, ini menjadi bagian yang perlu kita pelajari bersama. Jangan sampai kemudian kita berlomba menyampaikan usulan dan lain sebagainya, tetapi tidak ada ruang untuk bisa merealisasikan ini sehingga, apalagi kalau ini sudah kaitannya dengan Dapil dan kita sudah janji dengan orang Dapil dan ini sudah mendekati dengan tahun politik sehingga nanti ketika kemudian kita kasih janji di sana sementara di sini tidak ada alokasi, nanti dikatakan wah ini sudah tanda-tanda wah ini usul aja ngomong aja sudah jadi Anggota DPR juga nggak bisa realisasi karena memang tidak ada, tidak ada apa namanya *space* atau tidak ada cadangan atau tidak ada ruang yang memang ini akan bisa ditampung dengan pasti.

Ini maka kami perlu ada kepastian ketika kita menyampaikan satu usulan ini, pasti atau tidak. Kalau memang tidak pasti jangan kasih ruang Pak, itu. Karena kita juga kaitannya janji dengan pabrik, ini juga sangat berbahaya, jangan PHP.

Berikutnya juga saya sampaikan karena ini apa namanya kaitannya dengan amanah Fraksi, saya sampaikan dari, Sekretaris Fraksi menyampaikan bahwa di Ciamis itu ada stasiun yang sekarang banyak ada satu apa sering berhenti tetapi bangunannya itu kurang layak dan sebagainya, maka mungkin perlu dikaji dan ditinjau untuk stasiun Ciamis. Jadi ini bukan Dapil saya tetapi karena ini memang keperluan di sana sudah cukup tinggi Ciamis kalau memang itu memerlukan dan menurut kajian dari Pak Menteri itu bagus ini mungkin bisa dialokasikan ke sana.

Nah, berikutnya saya mendukung dengan apa namanya secara umum itu pengadaan PJUTS itu, ini secara umum karena ini akan bermanfaat, terutama di desa-desa. Maka itu saya mendukung untuk pengadaan apa karena *kasuria* itu karena jadi, yang nantinya bisa disampaikan di sana.

Nah ada beberapa usulan, nanti akan saya sampaikan secara rinci mungkin di, pada saat, ya tidak mengurangi rasa hormat. Saya pikir saya sampaikan dengan Dirjen sama Bapak Menteri saya yakin bahwa itu adalah sama kan itu sekalipun kan ini rapat dengan Pak Menteri biar itu bisa berjalan dengan baik, hanya pesan saya, saya akan sampaikan bahwa bagaimana Bapak memberikan ruang untuk bisa usulan-usulan ini bisa akan terakomodir gitu aja. Karena kalau usulan-usulan bisa diakomodir, maka tentu akan ada anggaran-anggaran yang sudah di-*breakdown* di masing-masing Dirjen ini tentu ada kurang lebihnya ada satu sisi yang naik, pada sisi lain juga ada yang berkurang, karena anggarannya itu masih tetep sehingga kayak *plendungan* aja Pak kalau di sini benjol di sini berkurang ini. Nah ini perlu ada rambu-rambu yang jelas sehingga kita ini.

Kalau ada yang semacam ini saya pikir rapatnya tidak akan panjang gitu Pak, tapi kalau ini semacam ini semuanya kalau komplain ini usulan saya gak masuk, sudah satu tahun *ndak* masuk, ini kan kita *ndak* enak. Saya pikir itu perlu ada kebijakan dan saya yakin Pak Menteri Perhubungan jagonya dan bisa untuk mengatasi ini.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Fadholi.

Jagonya Pak Menteri Perhubungan, tenang aja Pak. Pasti beres Pak 2023 ini, Pak Roberth bilang harus beres Pak Roberth, ya. Menguji ya oh menguji. Baik, terakhir Bu Athari silakan.

F – PAN (ATHARI GAUTHI ARDI):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati dan juga *Insya* Allah dirahmati oleh Allah, Pimpinan, serta Rekan-rekan Anggota Komisi V, dan juga Pak Menteri beserta seluruh jajarannya.

Saya mengucapkan selamat, saya lihat di berita waktu itu Pak Budi atas gelar barunya dan juga Pak Sekjen dan seluruh Plt Dirjen yang sudah ada.

Saya langsung aja, di sini kayaknya tadi usulannya sama kayak Teh Novi tipe-tipenya, yang pertama itu masalah terminal anak air di Kota Padang. Jadi saat ini memang itu kondisinya sudah beroperasi, bus sudah masuk dan sebagai macamnya, cuman hanya mereka itu hanya melintas Pak Menteri, jadi belum masuk, karena belum ada *parking space*-nya *inplacement parking* nya belum ada dan juga masalah pengendapan, itu juga masih perlu.

Kalau akses sebenarnya kemarin dapat laporan dari Dapil akses juga nggak kelihatan, tapi itu kan tanggung jawabnya Pemda. Nah, ini mungkin pemdanya belum fokus kali ya, mungkin masih banyak, fokusnya ke tempat yang lain, tapi sebenarnya ini sangat disayangkan karena Terminal Anak Air ini sangat bagus loh, Pak Menteri. Itu kereta api semua untuk jalur masyarakat itu sangat bagus ya sangat membantu masyarakat, cuma memang ada kendala-kendala sedikit yang tinggal diperbaiki.

Lalu yang kedua, ini yang paling-paling-paling-paling penting nih Pak Menteri, masalah *Sitinjau Lauik*. Kalau Pak Dirjen, Pak Menteri bisa lihat di Youtube, rekan-rekan juga bisa lihat di YouTube *Sitinjau Lauik* itu ada akun YouTube nya sendiri, followers-nya 2 Juta. Coba boleh dilihat YouTubanya *Sitinjau Lauik*, l-a-u-i-k, itu *followers*-nya 2 Juta isinya apa? Kecelakaan. Jadi setiap hari isinya tentang kecelakaan-kecelakaan yang terjadi, yang saat itu terjadi. Memang tiap hari pasti ada kecelakaan ya, bahkan baru-baru ini itu ada *viewers* sudah sampai 100.000 masalah kecelakaan di *Sitinjau Lauik*.

Kami mohon juga, dan juga selain juga di Lembah Anai, tapi yang paling genting ini *Sitinjau Lauik*, yang kedua di Lembah Anai. Ya saya mohon ada bagaimana ada rambu-rambu jalan dan juga *guardrail* dan yang lainnya untuk sarana penunjang di, apa namanya, jalan tersebut *Sitinjau Lauik* dan juga Lembah Anai.

Dan juga untuk penerangan jalan umum, memang kalau *problem*-nya kemarin PJU itu banyak yang dicolong-colong ya katanya, tetapi saya rasa dengan sistem yang baru, yaitu yang baterainya di atas itu Pak Menteri, *Insya Allah* itu nggak akan terjadi lagi permasalahan yang berikutnya, seperti permasalahan yang sebelum-sebelumnya.

Jadi saya mohon untuk Tahun 2023 ini Pak Menteri, anggaran itu agar ditambah, supaya potensi kecelakaannya itu minim ya. Jadi rambu-rambunya ditambah, penerangan jalan ditambah dan juga *guardrail* dan sarana-sarana lainnya. Kami paham bahwa ada pembangunan baru yang menjadi fokus dan prioritas dari Pemerintah saat ini, tetapi kami juga mohon yang *existing* jangan dilupakan, karena masyarakat kami banyak sangat mengandalkan jalur-jalur *existing* ini.

Lalu, saya kemarin terbang ke luar negeri. Akhirnya bisa keluar negeri ajak liburan anak-anak. Tapi di sini ada jadi fokus saya. Saat saya berjalan ke *gate* yang cukup jauh, itu yang umroh Pak Menteri, itu Ibu-Ibu udah tua bawa tas, saya nggak tahu kenapa bisa terjadi mereka harus lari ke *gate*, padahal kan harusnya sudah ada jam tunggu dan yang lainnya. Mungkin bisa diingatkan Pak Dirjen Udara, dan juga ke Angkasa Pura itu tolong dipersiapkan sarana untuk mereka mengantar dari tempat mereka menunggu ke *gate* seandainya tiba-tiba *gate*-nya berubah. Karena kasihan, Pak. Itu Ibu-Ibu umroh udah badannya sudah, mereka bisa umroh aja udah *Alhamdulillah*. Nah, dengan harapan kalau kita bantu orang untuk beribadah *Insya Allah* Tuhan akan bantu kita juga. Nah jadi itu Pak, khusus untuk umroh, apalagi nanti besok ini akan ada haji Pak Menteri ya, *Insya Allah* kita syukur-syukur kita bantu kita kecipratan pahalanya juga.

Lalu satu lagi ini dengar-dengar Hutama Karya dapat PMN, ya, 30 Triliun ya baru-baru ini tadi rapat dengan Menteri BUMN katanya mendapat PMN sebesar 30 Triliun. Nah, saya minta Pak Menteri untuk apa namanya, eh salah-salah, mohon maaf ini bukan dengan perhubungan, ini dengan PUPR, salah-salah, terlalu semangat ya masalah ini, masalah jalan.

Yang terakhir berarti Pak Menteri itu untuk peralatan pengujian kendaraan bermotor di Sumatera Barat, itu di beberapa Kabupaten/Kota usulannya sudah masuk ke saya, tapi karena memang keterbatasan anggaran di daerah itu perlu bantuan dari Pak Menteri, ya, untuk pemenuhan akreditasi PKB dan juga untuk pengadaan kendaraan uji keliling Pak Menteri, nah itu perlu untuk di daerah saya.

Dan, terakhir ini untuk pelayanan angkutan ke Singkarak dan juga ke Sawahlunto, karena dua daerah ini itu merupakan kawasan strategis pariwisata nasional sudah diputuskan oleh Pak Presiden kemarin.

Mungkin itu Pimpinan, Pak Menteri, ada, kalau ada yang salah atau kelebihan saya mohon maaf.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Ya terima kasih. Kita masih punya waktu kurang lebih setengah jam.

F – P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):

Pak Ketua, Pak Ketua, izin saya ada tambahan sedikit.

KETUA RAPAT:

Sebentar Pak Willem, saya selesaikan dulu yang belum Pak ya, karena waktu terbatas. Ya silakan, Pak Anang. Pak Anang ini juga sudah menunggu juga dari tadi. Silakan.

F – P. GOLKAR (Ir. H. ANANG SUSANTO, M.Si.):

Terima kasih, Pak Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Yang terhormat Pimpinan beserta seluruh rekan-rekan Anggota Komisi V,
Yang terhormat Pak Menteri beserta seluruh jajarannya,**

Sesuai arahan Pak Ketua, saya langsung saja kepada materi. Sangat penting bagi kami Pak Menteri penyelesaian-penyelesaian apa yang telah dijanjikan kepada masyarakat. Beberapa kali semenjak saya menjadi Anggota V dari awal saya mengajukan berdasarkan aspirasi masyarakat itu jembatan penyeberangan orang ya, yang berada di Kabupaten Bandung terutama titik Rancaekek yang terkenal banyak kecelakaan karena pas seliuwernya orang di sana. Nah, saya mohon melalui Pak Menteri ada tindak lanjut yang serius, ada tindak lanjut yang nyata untuk menyelesaikan masalah jembatan penyeberangan orang tersebut.

Terus yang kedua juga saya mohon keterangan dan penjelasan tentang rencana untuk menghidupkan kembali jalur kereta api ke arah Ciwidey ya. itu aja.

Terima kasih, Pimpinan.

Terima kasih, Pak Menteri.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik. Selanjutnya dari meja Pimpinan karena waktu sedikit. Silakan Pak Robert.

F – P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V yang kami banggakan,
Saudara Menteri dan seluruh jajaran yang saya hormati.**

Saudara Menteri, saya tidak terlalu banyak bertanya soal masalah-masalah di Dapil, Saudara Menteri. Nanti saya akan berikan beberapa usulan nanti yang akan saya berikan langsung pada Saudara Menteri.

Yang pertama, saya ingin sampaikan kepada kawan-kawan dan kita semua yang ada di sini, para Anggota dewan, kita di sini semua melakukan rapat dengan Saudara Menteri dan jajaran adalah semua berdasarkan amanat Undang-Undang yang kita ikuti. Maka sesuai dengan amanat Undang-Undang khusus dalam penganggaran, yaitu DPR bersama Pemerintah. DPR menyetujui usulan anggaran dari Pemerintah. Menyetujui dan tidak, jadi kita bisa tidak menyetujui, tidak harus menyetujui Undang-Undang ini.

Untuk itu, kita juga diamanatkan oleh sumpah janji kita untuk menyalurkan, memperjuangkan aspirasi dari daerah pemilihan kami Saudara Menteri. Saudara Menteri, kami ini tadi sudah disampaikan oleh salah satu Anggota saya ya tadi Fraksi Nasdem, Saudara Fadholi, saya ingin mempertegas apa yang disampaikan.

Menurut saya benar sekali Saudara Menteri, bahwa apa yang hari ini kita terima dari Saudara menteri tentang perencanaan Anggaran 2023. Saya kira sepantasnya Saudara Menteri juga melihat tentang Undang-Undang tentang Anggaran yang ada di DPR bahwa kami juga diamanatkan untuk membawa aspirasi, maka sepantasnya di dalam perencanaan ini ada ruang *slot* yang diberikan untuk Komisi V, ya, bukan cuman Anggota, tetapi kunjungan kerja dari Komisi ini juga harus tertampung semuanya, ini yang paling penting. Karena saya lihat di sini ada penyerahan hasil kunjungan Komisi V.

Kenapa harus hari ini diserahkan, karena kita sesuai dengan saya lihat temannya bahwa pembahasan awal RKL 2023. Makanya sebelum kita masuk jauh, kita menyerahkan itu agar nanti waktu kami membahas selanjutnya kami akan melihat ada nggak hasil-hasil kunjungan ini yang kami serahkan, tertampung tidak. Sebagai Pimpinan, salah satu Pimpinan saya akan fokus untuk melihat itu, Pak Menteri.

Kalau tidak ada ya, saya kira sepatutnya kami tidak menyetujui, berarti apa yang menjadi tanggung jawab Komisi V untuk melakukan kunjungan kerja, menerima aspirasi, aspirasi ini tidak bisa tertampung, tidak ada di dalam mata anggaran yang sebenarnya dan sepantasnya dan seharusnya itu harus ada. Ini yang menjadi catatan saya kepada kita semua, agar kita tahu bahwa inilah

tugas pokok kita untuk menjaring aspirasi, ini harus betul-betul dihormati bersama, terutama yang komisi melakukan. Karena ini kita bukan jalan seenak-enaknya, kita menghabiskan anggaran yang cukup besar juga untuk melakukan kunjungan-kunjungan kerja, yang berikutnya baru aspirasi Anggota. Jadi ini yang perlu saya garis bawahi.

Saudara Menteri, saya ada berapa usulan yang nanti ini, bukan nanti ini cuman mendapat perhatian kebijakan Pak Menteri untuk nanti bisa memberikan dukungan, terutama Pak Menteri dan jajaran ini saya mendapat laporan dan usulan dari salah satu Anggota kami dari Sulawesi Utara, yaitu ada di daerah Kabupaten Talaud, Sanger itu. Ada pelabuhan udaranya Pak Menteri, bahwa itu akan di, kalau di Papua dibidang dipalang, ditutup sama pemilik lahan, karena sertifikatnya masih, sampai sekarang mereka masih bayar pajak, tanah yang dipakai dibangun landasan penerbangan.

Maka ini minta kalau bisa ini tolong menjadi perhatian, saya minta untuk diberikan data-datanya seperti apa nanti kami akan menyampaikan ke Saudara Menteri melalui Saudara Dirjen Perhubungan Udara, agar ini kasihan itu penerbangan nanti akan berhenti di sana, karena memang kepemilikannya masih resmi, mereka masih bayar pajak sampai saat ini. Nah, ini yang harus mesti menjadi catatan Saudara Menteri dan saya kira itu yang kami sampaikan Saudara Menteri, ada beberapa ya bukan proposal ini tinggal kebijakan dari Saudara Menteri saja, ada permohonan (suara kurang jelas) nanti kami serahkan.

Saya kira itu Pak Ketua, saya kembalikan ke Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Roberth.

Silakan Pak Tamliha.

F – PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, Ketua dan.

Yang saya hormati para Wakil Ketua dan Anggota Komisi V, dan Pak Menteri beserta jajarannya yang saya hormati.

Saya yang fundamental saja. Presiden kan akan menetapkan bandara internasional dari seluruh Indonesia. Saya berharap Bandara Syamsudin Noor yang tinggal 500 Meter lagi panjangnya, Syamsudin Noor Banjarmasin ya Pak ya, yang panjangnya kurang 500 Meter untuk pesawat berbadan lebar itu bisa di *existing* pada Anggaran 2023.

Selanjutnya, kami berharap bahwa, semua yang disampaikan para Anggota ini saya, saya cermati Pak Menteri itu 80% bolak-balik ini itu saja yang disampaikan, dan saya punya datanya masing-masing, kita berharap bahwa Pak Menteri bisa menampung aspirasi itu agar mendapatkan dukungan politik anggaran dari Komisi V.

Terima kasih, Pimpinan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Tamliha.

Selanjutnya adinda Iwan silakan.

F – P. GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Terima kasih, Ketua.

**Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati,
Pak Menteri beserta jajaran yang saya hormati.**

Saya baru sadar Pak kalau di ruangan ini hanya Ketua Komisi V aja yang orang Bugis, yang lainnya iya, jadi keberpihakan anggaran Pak Ketua Komisi V aja yang banyak ke Sulsel kayaknya.

Pak Menteri, perlu kami sampaikan pada saat Kunker Spesifik Komisi V di LRT Jabodetabek beberapa waktu yang lalu. Kami pada saat itu mendatangi lokasi terjadinya kecelakaan tabrakan lokomotif kalau gak salah, yang kemudian kami mendapatkan laporan bahwa kecelakaan LRT tersebut disebabkan oleh pada *human error*, namun kemudian saya mendengar bahwa nanti tanggal 17 Agustus ini akan ada uji coba yang akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Saya agak khawatir kalau dicoba ini dapat dilaksanakan, setelah itu bisa beroperasi maksimal atau tidak.

Karena permasalahan yang ada sebenarnya adalah kalau yang kami ketahui adalah *integrator system* ya, yang mengintegrasikan antara sarana dan prasarana dan signal, persoalan ada di situ. Jadi apa yang kami didapatkan penjelasan pada saat itu ternyata tidak seperti itu kondisinya dan kami agak khawatir Pak bahwa nanti rencana untuk pengoperasian ini seharusnya dibenahi, dibenahi lebih maksimal dulu sebelum betul-betul harus dipaksakan untuk beroperasi, karena ini berkaitan tentunya dengan nyawa, karena kita khawatir Pak jangan sampai kecelakaan-kecelakaan yang selama ini sudah ada itu bisa terjadi lagi.

Kemudian, Pak menyangkut masalah subsidi PSO, *Public Service Obligation*. Seberapa besar untuk Tahun 2023 ini, kalau saya gak salah mungkin kereta api mendapatkan PSO yang paling besar dibandingkan

Perhubungan Laut, kemudian apakah betul untuk KCIC atau LRT ini juga akan mendapatkan subsidi PSO tersebut, karena kalau kami gak salah itu investasi KPBU ya swasta murni, tentunya bukan masuk daripada perintis, Pak.

Dan lagi saya mendengar bahwa berdasarkan edaran Menteri Perhubungan, PT. KAI yang memonopoli subsidi ini mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari total subsidi yang mereka kelola. Saya mohon penjelasan Bapak menyangkut masalah itu.

Kemudian, kita beralih ke persoalan *Over Dimension Over Load* untuk darat yang terjadi banyak tadi disampaikan oleh teman-teman terjadi kemacetan di jalan-jalan, jalan-jalan poros nasional itu dikarenakan ini, Pak. Para pengemudi ODOL ini menunggu sampai kemudian petugas-petugas jembatan timbang ini tidak berada di tempat, mereka menunggu sampai kemudian bisa berjalan setelah jembatan timbang kita ini tidak beroperasi.

Nah oleh itu, oleh karena itu saya berharap bahwa khusus jembatan timbang ini kita aktifkan 24 jam, Pak, supaya tidak ada opsi bagi pengendara-pengendara ini untuk menunggu kekosongan itu. Karena mereka parkir Pak, mereka parkir di tempat-tempat tertentu yang kemudian mengakibatkan kemacetan yang panjang, apalagi misalkan yang masuk di daerah poros Maros-Bone, yang mana jalannya itu berliku-liku, sehingga pada saat petugas jembatan timbangnya tidak ada mereka bersamaan berangkat dan itu menimbulkan kemacetan, bahkan bisa 7 sampai 8 jam di tempat itu.

Kemudian Pak, menyangkut masalah kecelakaan laut, kecelakaan kapal yang kemarin ini yang di daerah Selat Makassar. Tadi sudah disampaikan oleh beberapa teman juga, sejak periode yang lalu saya juga sudah meminta bantuan Bapak untuk memberikan bantuan kapal perintis di sana. Jadi mudah-mudahan karena kejadian ini bukan kejadian pertama, ini kejadian yang keduanya Pak, yang dulu pernah pada saat lebaran mereka orang-orang dari pulau ini datang ke Makassar untuk belanja dengan menggunakan kapal nelayan juga, kapal ikan. Jadi, ini akibatnya kemudian ya terjadilah kecelakaan-kecelakan itu.

Kami berharap bahwa dari Kementerian Perhubungan bisa memberikan bantuan kapal, kapal perintis mungkin penyeberangan, Pak. Karena keselamatan ini, khusus Kabupaten Pangkep ini memiliki empat kecamatan pulau Pak, di sana ada 40 Ribu lebih jiwa yang kemudian di mana pulau tersebut lebih berdekatan dengan Lombok ataupun juga di kecamatan yang lainnya juga berdekatan dengan Kalimantan.

Nah ini memang di pulau-pulau ini juga tidak terfasilitasi dengan bagus masalah dermaganya, masih membutuhkan dermaga-dermaga penyeberangan dan bahkan mungkin yang kita butuhkan adalah bandara perintis, Pak. Karena jarak tempuh dalam laut itu bisa sampai 9 jam, 10 jam, apalagi dalam cuaca yang tidak bagus bisa lebih, lebih lama lagi, mungkin dengan bandara-bandara perintis seperti yang di Yahukimo atau di DK atau di Papua itu bisa di fasilitasi khusus dengan Cessna, karena mengingat fasilitas-fasilitas kesehatan dan lain sebagainya di sana juga masih sangat terbatas,

sehingga dibutuhkan untuk reaksi cepat mungkin ada bandara-bandara perintis yang sifatnya bisa dalam kondisi darurat.

Kemudian Pak, pada periode, para rapat yang lalu Pak Menteri kami juga mengusulkan untuk bandara pariwisata di Bila Bulu Kumba, kami harap pada saat itu saya mendampingi Menteri Parekraf untuk lakukan kunjungan ke sana dan di sana menjadi daerah tujuan wisata, desa wisata yang kemudian sudah cukup terkenal namun jarak tempuh dari Makassar ke sana itu juga cukup jauh. Memang jarak bandaranya, bandara Makassar Sultan Hasanuddin dengan Bulu Kumba ini kurang lebih 105, 105 Kilometer saja Pak, tetapi kemudian dengan spesifikasi sebagai bandara pariwisata mungkin itu akan berbeda kebijakannya.

Kemudian, Pak, saya juga ingin menanyakan menyangkut masalah dukungan konektivitas ke KCJB, Padalarang – Bandung. Kenapa KCIC ini nggak langsung aja Pak ke Bandung, karena sekaligus subsidi dan akhirnya juga saya yakin bahwa orang menginginkan perjalanan yang cepat dan nyaman, kalau misalkan harus turun di Padalarang terus nyambung lagi ke Bandung dengan kereta yang berbeda, tentunya itu bukan menjadi opsi atau pilihan yang baik sebagai penumpang, karena repotnya luar biasa ngangkat barang dan lain sebagainya, apakah ini mungkin bisa ada solusi ke depan.

Mungkin begitu, Ketua. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ada hal-hal yang tidak berkenan Pak Menteri.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Iwan.

Pimpinan, Pak Ridwan silakan. Oh tidak, baik.

Bapak, Ibu sekalian,

Demikian sudah melakukan pendalaman kita semua Anggota, Pimpinan juga, saya terakhir. Pertama karena waktu Pak Menteri terbatas ya, pastilah nanti tidak mungkin dijawab semua, Sekretariat juga tolong ya kalau rapat, ini kan kita ada rapat kemarin pertanyaan yang dijawab tertulis tolong disampaikan ke Anggota, tolong, saya banyak ditanya nih sama Anggota nih rapat terdahulu yang jawabannya tertulis harusnya di rapat ini disiapkan, supaya kalau yang belum jelaskan nanti temen-temen bisa tanyakan kembali. Tapi masih ada waktu kita di pendalaman temen-temen nanti dengan Eselon I.

Kemudian, Pak Menteri mungkin kita perlu mencari formulasi yang pas nanti ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh para Anggota tadi, terkait dengan program-program yang diusulkan oleh teman-teman, walaupun sebagian sudah pasti Pak Menteri dan seluruh jajaran sudah mencatat itu loh.

Namun saya harus mengatensi banyaknya permintaan, kemudian yang disampaikan juga langsung kepada saya hampir seluruh Anggota Komisi V dan Pimpinan bahwa alokasi untuk ruang kepada Komisi V DPR RI dalam rangka kesepakatan bersama APBN Tahun 2023 ini, ya, apalagi ini menjelang tahun politik Pak Menteri teman-teman pastilah berharap betul supaya seluruh usulan ya, yang dapat diakomodir, apalagi manakala cocok dan segaris dengan Renstranya Kementerian Perhubungan.

Kemudian saya tidak ingin panjang lebar dulu karena keterbatasan waktu, saya ke Dapil satu aja Pak, kemarin saya ke Ketapang Pak Novi ya, Dirjen Udara, saya disambut oleh Bupati, itu orang Bupati.

Kemudian, terkait dengan bandara baru yang di Kayong, saya sudah ke lapangan juga kemarin, rupanya pembebasan lahan juga belum selesai. Namun yang saya lihat, setelah saya ke sana langsung lihat Pak mungkin yang logis itu kita melakukan optimalisasi bandara yang ada dulu. Karena kalau kita mulai pun 2023, tidak mungkin bisa selesai 2024, Pak. Nah, bandara Ketapang ini ada *obstacle* Pak di ujung dua landasan itu ya, yang satu hotel ya, yang satunya lagi ada kalau nggak salah saya ada satu bangunan juga di ujung landasan sebelahnya, akhirnya *runway* ini tidak, tidak optimal.

Saya kemarin bicara dengan Pak Bupati, saya bilang Pak Bupati harus korbankan salah satunya. Akhirnya kemarin ada klinik ya kalau saya gak salah, ada klinik yang akhirnya oleh Pak Bupati disanggupi untuk dibongkar di ujung *runway* sebelahnya, namun demikian karena *runway* sebelah sudah kemakan hotel Pak, udah satu hotel di ujung pas di jalur landasan pacu, akhirnya *nggak* bisa maksimal landasan ini, memang bandara ini harus di perpanjang *runway* nya, Pak.

Ketapang sampai hari ini Pak Menteri memang tidak ada solusi, kalau jalan darat itu jauh sekali Pak, kita harus menempuh apalagi jalannya kondisinya rusak ya Pak Boy ya, kita jalan ke Ketapang itu 7, 8, 9 jam Pak ya baru nyampai ke Ketapang, itu jarak tempuhnya jauh sekali. Jadi memang dan ini bandaranya jauh sekali Pak ya, dari sisi bisnis pun saya lihat penumpangnya, *demand* nya cukup tinggi lah, sehingga bandara ini sangat *worth it* kalau untuk ditingkatkan gitu, penambahan *runway* nya, Pemda udah siap nanti bebaskan lahannya dan seterusnya lah. Saya juga sudah bicara dengan Pak Kepala Bandaranya, termasuk dengan Pak Boy, ini Dapilnya Pak Boy, kampungnya Pak Boy sebenarnya Pak tapi beliau tadi tidak menyenggol terlalu dalam saya coba menggambarkan lebih jelas kondisi bandara ini memang *demand* nya tinggi dan tidak ada solusi Pak, ya.

Pilihannya jalan darat dari 9 sampai 10 jam atau naik pesawat yang dengan kondisi yang bandara seperti ini. Kalau cuaca tidak bagus sangat-sangat riskan Pak, saya melihat langsung kemaren lokasi ini karena melihat dengan mata kepala sendiri. Saya rasa itu aja dulu, nanti lain-lain kita (suara kurang jelas).

Silakan Pak Ridwan.

F – P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya lupa singkat aja ini karena Pak Menteri ada apa namanya waktunya yang sangat terbatas. Tanggal 16-18 itu Pak ada kunjungan spesifik di Sulawesi Tenggara, mungkin saya minta Pak Menteri untuk mengutus yang minimal adalah Eselon berapa yang layak untuk mengambil satu kebijakan untuk kunjungan kerja di sana. Kunjungan kerja di sana itu lebih kepada bandara Pak, kunjungan kerja spesifik lebih kepada bandara di seluruh Sulawesi Tenggara.

Hanya itu saja Pak Menteri yang ingin kami sampaikan. Ya, Pak Sekjen juga sudah dengar sendiri. Terima kasih.

Terima kasih, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Ridwan.

F – P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Pak Menteri, satu menit saja.

KETUA RAPAT:

Silakan. Silakan, silakan.

F – P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Ini saya lihat dari tadi nih Saudara saya di sana diam-diam aja nih. Saya protes Pak Menteri, karena saya lihat semua tadi Ketua pakai topi Sulawesi Selatan ya kan. Susah kalau saya minta pakai baju adatnya Saudara saya William di sana, gak perlu pakai yang di bawahnya, pakai di atas aja kan ada topinya itu melambangkan orang lihat saja ini sudah Papua. Nah, gak papa, gak itu boleh aja kan ada topinya itu, ya kan ada. Nanti saya, Pak Willem nanti bawa ya. Jangan lupa bawa ya.

KETUA RAPAT:

Buat saya satu, Pak Willem.

F – P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Nanti berikan kepada, ya. Jadi harus ada juga, Pak Menteri.

Saya memang beberapa kali Pak Ketua, ini untuk kita semua. Saya ngomong sama Saudara Kapolri, saya ngomong juga bahwa saya minta

supaya, tunjukkan bahwa Papua itu milik Indonesia, jangan cuman. Jangan cuman orang Papua itu jadi Kapolda di Papua, di luar Papua, maka menunjukkan bahwa memang dihargai. Dulu.

Sekarang kita bicara jujur di DKI Jakarta. Jakarta ini saham pajak besar itu dari Papua, *freeport* itu berikan pajak di Papua. Tapi di kantor Gubernur DKI itu nggak ada orang Papua, gak ada orang Papua. Di Medan sana tidak ada orang Papua di kantor Gubernur, tapi di Papua ada orang Medan. Di Jawa Tengah tidak ada orang Papua, di Jawa Barat tidak ada, tapi di Papua ada orang Jawa Barat.

Tolong berikan *space* ruang itu untuk kami, bahwa milik Papua ini milik Republik, Republik ini milik Papua. Nah, ya tolong di sini tidak ada. PUPR saya lihat ada. Pak Menteri, selaku perwakilan dari Papua kami mohon ini supaya bahwa republik ini memang milik kita bersama.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, sudah bisa kita tangkap Pak Menteri.

Nanti Pak Willem sama Pak Roberth tolong bawa topinya itu yang ada bulu burung itu loh Pak, ya toh, bila perlu nanti Komisi V ada hari Papuanya kita pakai semua itu topi ya. Nah biar seru. Baik saya rasa.

F – P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):

Pak Ketua. Pak Ketua saya ada sedikit. Pak Ketua saya ada sedikit.

KETUA RAPAT:

Pak Willem, boleh dipersingkat gak karena waktu Pak Menteri terbatas ya silakan.

F – P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):

Terkait dengan program prioritas 2023 ini di Dirjen BPSDM, di situ ada tersebar di 26 UPT di Dirjen BPSDMT. Kalau memang ada kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi dan sertifikasi di Kementerian Perhubungan, kalau boleh kami diundang, dihadirkan supaya memperkuat elektabilitas dan elektoral kami, keluarga besar Komisi V.

Sekian, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Demikian Pak Menteri, waktu kita sudah jam 2 kurang 5 menit.

Oh saya lupa satu Pak Novi, Pak Dirjen Udara nanti yang Bandara Pangsuma Pak dengan waktu Bapak dia pernah pergi ke sana dan lihat dia punya terminalnya Pak ya kurang, kurang layak lah itu. Saya pikir juga bisa dipercepat, kalau itu mah, gak terlalu biaya terlalu besar Pak, Bandara Pangsuma Putussibau.

Kemudian, Singkawang Pak kita juga harus kita selesaikan ya. Saya berharap 2024 Singkawang sudah selesai makanya harus kita cicil dari sekarang.

Pak Menteri waktu tinggal sedikit, saya persilakan Bapak untuk mengatur waktu bagaimana menjawab yang penting-penting, nanti pendalaman kan masih dengan Eselon I. Saya persilakan.

MENTERI PERHUBUNGAN RI (Dr.(HC). Ir. BUDI KARYA SUMADI):

Terima kasih, Pak Ketua.

Ketua dan para Wakil dan para Anggota Komisi V yang saya hormati,

Pertama kali saya ucapkan terima kasih atas masukan-masukannya, karena masukkan ini pasti akan memperkaya cara kerja dan alokasi anggaran yang akan kita lakukan.

Banyak teman-teman yang minta konfirmasi tentang bagaimana kita melakukan. Kami memang berusaha untuk mencari titik temu walaupun belum maksimal dan saya minta kepada para Dirjen dan Kepala Badan pada saat melakukan rapat-rapat dengan DPR melakukan optimasi tentang pekerjaan-pekerjaan yang ada dengan melakukan alokasi anggaran tertentu.

Memang pesen dari Bapak Presiden dan juga *policy* dari Kementerian Keuangan bahwa kita diminta untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sekarang tengah dilakukan sehingga diharapkan 2024 itu akan selesai. Namun demikian kalau ada anggaran-anggaran yang relatif tidak terlalu besar, mungkin kita mampu untuk mengalokasikan yang *Insyah* Allah bisa dikerjakan dalam Tahun Buku 2023 dan 2024. Oleh karenanya, kita harus melakukan satu optimasi ya tentang dana-dana yang ada di situ.

Melihat apa yang disampaikan banyak sekali berkaitan dengan darat, baik itu lampu, juga bus, juga *guardrail* dan sebagainya. Mungkin itulah seperti yang saya sampaikan dengan yang disampaikan Pak Hamka, kita meningkatkan jumlah alokasi yang di sana, karena memang kalau menjawab mengenai kecelakaan lalu lintas maka hal-hal tersebut salah satu upaya dari kita yang secara tidak langsung menjawab apa yang disampaikan oleh beberapa teman-teman tadi.

Nah, oleh karenanya darat nanti saya minta untuk secara detail melakukan identifikasi, di mana saja tempat-tempat kecelakaan itu terjadi sehingga *guardrail*, lampu, dan fasilitas-fasilitas itu dilengkapi dan juga kita

sebenarnya melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi berkaitan dengan keselamatan.

Berkaitan dengan keselamatan ini tentu butuh satu *endoser*, dan kita tahu bahwa Bapak Ibu adalah salah satu tokoh-tokoh di daerah, kami mohon apabila ada kegiatan keselamatan di daerah itu kami minta Bapak Ibu sekalian untuk hadir dan kegiatan itu sering dilakukan dan Dirjen Darat melakukan satu *effort* untuk melakukan itu.

Memang upaya-upaya ini harus dilakukan bersama, tidak mungkin kita lakukan tanpa melibatkan masyarakat juga Bapak Ibu sekalian yang memiliki *follower* atau pengikut yang banyak yang sehingga program-program kita itu *legitimate*.

Bapak, Ibu sekalian,

Memang anggaran kita praktis tidak naik tidak turun, hampir pas naik berapa miliar. Ini kita syukuri, tetapi mengingat kebutuhan itu banyak sekali kita memang berusaha untuk menjalani *creative financing*.

Saya sengaja karena tadi ditanya oleh dua dari Dapil Sumsel berkaitan tiga orang Tanjung Carat, karena tidak dapat APBN bahkan kita upayakan Pemda Sumsel dan swasta untuk melakukan itu dan *Insyah* Allah setelah itu Pelindo akan ikut, Pak. Jadi ada tiga dermaga, dua dermaga oleh swasta, satu dengan Pelindo. *Insyah* Allah dalam waktu dekat kita akan melakukan mulai, mulai kita lakukan.

Mengapa saya sampaikan ini, karena ini mungkin pertama kali pelabuhan itu dilakukan oleh swasta dan harapan kami dengan ini berhasil banyak fasilitas yang bisa dilakukan swasta. Katakan kita akan melakukan terminal pelabuhan udara dan sebagainya, karena memang fiskalnya semakin sedikit. Makassar-Pare Pare pun sebagian sudah ada swasta yang masuk di situ.

Nah oleh karenanya, sejalan dengan apa ide dari Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan kesertaan swasta, banyak sekali potensi pelabuhan yang dimungkinkan untuk dilakukan investasi. Kami tengah melakukan inventarisasi titik-titik pelabuhan itu baik yang sudah dijalankan maupun yang belum. Apabila itu bisa dilakukan oleh swasta maka ruang fiskal kita itu lumayan lebih, lebih banyak. Jadi *creative financing* sudah kita lakukan, juga PHLN kita intensif untuk mencari alternatif-alternatif untuk saat ini.

Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas masukan-masukan, kami akan berusaha untuk meng-*cover* apa yang disampaikan itu. Tapi apabila tidak mungkin memang ada satu hal yang kurang bisa.

F – PDIP (Ir. SUDJADI):

Saya, saya interupsi sebentar Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya silakan Pak.

F – PDIP (Ir. SUDJADI):

14 Februari itu ada Pileg. Tanggal 15 Februari itu hanya tinggal dua pilihan terus atau *wassalam*. Intinya mohon aspirasinya konkrit, Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Menteri dilanjut.

F – P. NASDEM (H. SYARIEF ABDULLAH ALKADRIE, S.H., M.H):

Interupsi, Pak.

KETUA RAPAT:

Bapak Syarief silakan, Wakil Ketua Badan Anggaran. Silakan.

F – P. NASDEM (H. SYARIEF ABDULLAH ALKADRIE, S.H., MH):

Terima kasih kaitan dengan ini, ada beberapa tadi disampaikan oleh Pak Menteri, ya memang kemampuan fiskal tapi saya masih bersyukur, kita masih bersyukur Kementerian Perhubungan tidak turun, masih naik masih untung itu Pak walaupun naik sedikit itu masih beruntung.

Namun dengan demikian, tentu tadi menyambung apa yang disampaikan oleh teman-teman yang lain termasuk Pimpinan, Pak Roberth. Saya kira supaya ini kaitannya, karena ini juga merupakan amanat konstitusi, Undang-Undang MD3 mengatakan bahwa, Anggota DPR itu memperjuangkan daerah pemilihannya, sehingga dengan demikian tentu apa yang disampaikan oleh teman-teman ini juga harus konkrit yang bisa kita pertanggungjawabkan ke Dapil, kaitannya bahwa apa yang akan disampaikan pada saat kita itu ya ada yang kita, persoalannya kami mengusulkan mendorong bukan persoalan yang lain-lain, mendorong bahwa program itu betul-betul yang diinginkan oleh masyarakat di Dapil yang kita sampaikan.

Saya berharap ini bisa profesional juga, artinya tergambar masing-masing apa yang disampaikan oleh kawan-kawan itu, sehingga nampak terakomodir di situ sebagai fungsi DPR sebagai fungsi *budget* untuk itu.

Yang kedua berkaitan tadi menyambung juga. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Lasarus berkaitan dengan bandara Ketapang yang memang ini kan sejak lama, artinya bandara Ketapang itu memang dulu kita dorong untuk diperpanjang, tapi *problem* nya, persoalannya memang keterbatasan sehingga pada waktu itu muncul atau masuk dari Kementerian Perhubungan mencari untuk itu sampai alternatif nya itu Kayong bahkan sudah disurvei.

Tapi saya kira saya menunggu saja kaitan dengan itu untuk dioptimalkan dulu yang ada, karena memang Kabupaten Ketapang ini ada berkaitan menyangkut masalahnya memang cukup jauh dan di sana ya cukup tinggi pergerakan terhadap pertumbuhan di sana.

Namun dengan demikian ini tentu akan ada jangka panjang, kaitan dengan *penlock* yang saya kira sudah diusulkan itu sesuai dengan *domain* Kementerian, berkaitan dengan DED kan *ndak* besar Pak, mungkin perlu didorong saja itu untuk berkaitan dengan persiapan ke depan, karena saya pikir bandara yang ada di Ketapang sekarang *ndak* optimal juga untuk dikembangkan untuk lebih jauh. Karena mungkin desain panjangnya itu kan Ketapang akan jadi satu provinsi, desain panjangnya. Pak Boy itu dipersiapkan untuk jadi Gubernur di Ketapang itu.

Karena kebetulan sama Dapil Pak Boy dengan Dapil saya sama, sama-sama satu Dapil ya berkaitan dengan itu, cuma kebetulan dia lahir di Ketapang saya di Kebun Raya, jadi dekat aja Pak antara Kayong dengan Kubu Raya itu apa tetangga.

Jadi, saya kira berkaitan dengan ini kebetulan kita setiap turun itu karena kita reses selalu disampaikan itu. Kami ini cuma *anu* saja memperkuat pada saat Menteri Perhubungan sudah menetapkan itu di Kayong.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Bapak, Ibu sekalian.

Pak Menteri, masih ada yang mau ditambahkan? Baik.

Nanti gini teman-teman sekalian ya, kita sudah bersepakat silakan buat usulan nanti lebih bagus kalau bisa sejalan dengan Renstra yang ada di Kementerian gitu loh, supaya tidak keluar dari kriteria-kriteria yang diwajibkan oleh Bappenas dan seterusnya.

Saya rasa itu barangkali, aspirasi-aspirasi nanti tolong disampaikan, Pimpinan sudah sepakat ya kita kalau bisa rapat dalam pembahasan anggaran ini konkrit ya seperti Pakde tadi sampaikan, usulannya apa baik di darat, laut, udara. Kemudian kemampuan Kementerian untuk menampung seperti apa itu aja yang kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya, ya. Setuju ya cocok ya. Perlu diketok gak ini, diketok gak Pak Roberth? Pak Ridwan? Pak Tamliha setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Berarti tak ketok semua. Berarti nanti konkrit kita rapat berikutnya bahas program ya, pasti teman-teman di Kementerian bertanya, lah, Pak Lasarus kan enggak boleh masuk di satuan 3, itu yang ga boleh masuk satuan 3 itu Banggar Pak, bukan komisi. Ini tata tertib di komisi itu kita sebetulnya enggak ada larangan masukan, masuk di satuan 3 ya. Baik jadi Pimpinan sudah sampaikan semua.

Terakhir Pak Menteri terkait dengan PNBP, Pak. Kita pernah ngobrol juga soal ini sebetulnya Pak Menteri ya, terutama di sektor yang paling besar kita itu kan di laut Pak, PNBP paling besar itu ya di laut, jadi saya berharap di laut ini untuk hal-hal tertentu kan kita lihat dominasi Pelindo itu besar sekali Pak di laut. Ya untuk supaya kita bisa tau lah dibikin kontestasi sedikit lah di laut itu Pak Menteri, supaya kita nanti bisa tahu ya seberapa kuat Pelindo memenuhi kewajibannya dan seberapa baik swasta murni bisa memenuhi kewajibannya. Jadi ada kontestasi Pak dengan bisnis yang sama kita bisa lihat profilnya apakah Pelindo pemain lama ini sudah sebaik mungkin memenuhi harapan kita terkait dengan PNBP, nanti kita ukur dengan pihak lain yang terlibat di bisnis yang sama.

Menurut saya ini baik bagi Kementerian dan baik bagi bangsa ini gitu loh. Jadi saya rasa itu, teman-teman sekalian ya. Sekarang kita ke kesimpulan rapat, silakan. Saya berusaha untuk membaca bisa lebih cepat.

Draf Kesimpulan Rapat Kerja Komisi V DPR RI Dengan Menteri Perhubungan, Selasa, 7 Juni 2022.

Point 1, Komisi V DPR RI memahami paparan tentang Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2023 Kementerian Perhubungan sesuai surat bersama Menteri PPN/ Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan dari Nomor S-353/MK.(2)/2022 dan Nomor B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04 2022 hal pagu indikatif belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2023 Tanggal 18 April 2022 sebagai berikut:

- a. Pagu kebutuhan Tahun Anggaran 2023 Rp73.845.092.377.000,-
- b. Pagu indikatifnya Rp33.021.955.285.000,-
- c. Ada *backlog* sebesar RP40.823.137.092.000,-

Selanjutnya, Komisi V DPR RI akan memperjuangkan penambahan anggaran untuk menutup *backlog* terhadap program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat sesuai mekanisme pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023, di DPR RI.

Di poin satu ini maksudnya manakala, gituloh, teman-teman di Banggar seperti Pak Syarief sebagai Wakil Ketua, ada Pak Hamka di sini sebagai senior di Banggar dan teman-teman yang di Banggar yang lain yang ada di Komisi V ternyata bisa memperjuangkan tambahan untuk menutup *backlog* yang 40 Triliunan ini posisi kesimpulan rapat kita terbuka untuk itu. Baik.

Point yang kedua, Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Perhubungan untuk menyesuaikan alokasi Pagu Anggaran Belanja dalam penyusunan program dan kegiatan pada RKA K/L RAPBN Tahun 2023

berdasarkan usulan dan hasil kunjungan kerja Komisi V DPR RI dalam memperjuangkan program pembangunan berskala nasional, termasuk program pembangunan yang merupakan aspirasi daerah pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;

Yang ketiga, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut antara lain:

- a. Evaluasi terhadap tarif angkutan penumpang dan barang;
- b. Pemanfaatan fasilitas terminal yang telah dibangun;
- c. Peningkatan pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan transportasi;
- d. Mengoptimalkan peran teknologi pada jembatan timbang;
- e. Memaksimalkan potensi PNBK sektor Perhubungan.

Kalau saya kasih saran poin 3 ini masuk di catatan ya, tapi saya dengar dulu teman-teman di Komisi V dulu. Ini cukup atau perlu perbaikan? Ya, Pakde cukup ya.

F – PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, Pak Tamliha silakan.

F – PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Itu memaksimalkan potensi PNBK sektor Perhubungan itu, itu sepertinya ranah Banggar deh. Nantikan Badan Anggaran akan mengundang seluruh Sekjen Kementerian untuk membicarakan PNBK secara khusus. Jadi pemanfaatan sama.

KETUA RAPAT:

Memaksimalkan potensi penerimaan dan pemanfaatan. Potensi penerimaan dan pemanfaatan tambahkan aja. Dan pemanfaatan PNBK sektor perhubungan. Cukup? Cukup ya.

Baik-baik saja kok ini *ndak* ada yang disakiti, ya. Setuju? Ketok nih.

(RAPAT: SETUJU)

Tepuk tangan lah. Pak Menteri sekarang, kalau ada yang Bapak tidak setuju sampaikan ketidaksetujuan di mana Pak, silakan. Setuju Pak ya. Baik.

(RAPAT: SETUJU)

Saya tidak setuju kalau Bapak tidak setuju, Pak.

Terima kasih, Bapak Ibu sekalian. Maka selesai lah rapat kita pada hari ini dengan disepakatinya kesimpulan. Saya atas nama Pimpinan mengucapkan terima kasih dan mohon maaf Pak Menteri manakala rapat ini, dalam rapat ini berjalan ada hal-hal yang kurang berkenan. Sebelum saya akhiri, saya beri kesempatan satu menit lah kepada Pak Menteri untuk menyampaikan kata-kata penutup.

Saya persilakan.

MENTERI PERHUBUNGAN RI (Dr.(HC). Ir. BUDI KARYA SUMADI):

Bapak, Ibu sekalian.

Saya selalu berpikir dan mempunyai *mindset* bahwa kolaborasi adalah satu hal yang baik dan apa yang kita lakukan adalah kolaborasi. Bagaimana kami bisa menyelesaikan mudik kemarin, bukan karena kami, tetapi kolaborasi termasuk dengan DPRD.

Nah oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian jangan khawatir bahwa kami juga berpikir bagaimana anggaran ini bisa kita kolaborasikan agar bermakna untuk bangsa.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Menteri.

Terkhusus evaluasi mudik dan balik nanti kita agendakan tanggal 20 Juni. Karena ini rapat resmi, saya harus menyerahkan juga resmi, ini hasil kunjungan kerja sebelum saya ketok tutup saya minta Pimpinan semua ke depan bersama Pak Menteri untuk kita serahkan hasil Kunjungan Kerja Komisi V.

**(PENYERAHAN DOKUMEN HASIL KUNJUNGAN KERJA KOMISI V
KEPADA MENTERI PERHUBUNGAN RI)**

Bapak Ibu sekalian, rapat belum saya tutup ya, rapatnya belum ditutup ya, ya saya harap kembali ke tempat duduk masing-masing. Supaya tertib menutup rapatnya, tidak seperti kapal yang sedang banyak kemasukan air. Pak Iwan, silakan mungkin sedikit katanya ada mau disampaikan.

**F – P. GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si.) – WAKIL
KETUA KOMISI V DPR RI:**

Iya Pak Menteri, saya terlupa tadi menyangkut masalah Pelabuhan Kajang. Tahun Anggaran ini sudah dianggarkan tapi di bintang, Pak. Jadi saya minta tolong supaya gimana persoalan itu bisa segera diselesaikan, hal ini juga sudah disampaikan kepada Pak Dirjen Perhubungan Laut.

Ini ada persoalan sedikit di lapangan, tetapi jangan sampai investasi kita yang tahun lalu itu tidak efektif lagi karena tidak dilanjutkan pada tahun anggaran ini, mohon perhatian Bapak mengenai Pelabuhan Kajang ini.

Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih, Bapak Ibu sekalian.

Maka dengan demikian selesailah rapat kita pada hari ini. Terima kasih Pak Menteri dan seluruh jajarannya sekali lagi ya, rapat ini sudah berjalan dengan lancar dan baik, tinggal kita nanti dalam di pertemuan-pertemuan RDP-RDP berikutnya.

Sekali lagi, saya atas nama Pimpinan mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf manakala dalam rapat ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Dengan mengucap syukur *alhamdulillah* rapat ini saya nyatakan selesai dan saya tutup.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.10 WIB)

JAKARTA, 7 Juni 2022
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.
NIP. 196912021998032002